



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025 ini disusun mengacu kepada Rancangan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 dan selanjutnya Bersama dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025 digunakan sebagai dasar Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025 diharapkan Dinas Pangan dan Pertanian dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan memberikan percepatan pelaksanaan rencana kerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2025.

Akhir kata semoga Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025 ini bermanfaat khususnya bagi

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Ditetapkan di : Cimahi

Tanggal : 22 Juli 2025

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian



TITA MARIAM, S.Pt., M.M

NIP. 197007061998032006

LAMPIRAN XV:
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, termasuk evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahannya, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan Perubahan Renja apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran awal, atau karena adanya kebijakan strategis dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, yang menegaskan pentingnya penyesuaian dokumen RKPD terhadap arah kebijakan terbaru serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun berjalan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025 disusun sebagai respons strategis terhadap dinamika kebijakan pembangunan yang mengalami pergeseran signifikan pada awal periode perencanaan tahun 2025. Periode ini menandai fase transisi pemerintahan di tingkat nasional dan daerah, ditandai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Perubahan kepemimpinan tersebut melahirkan dokumen perencanaan jangka menengah baru, baik di tingkat nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, maupun di tingkat daerah melalui RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 dan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029, yang membawa arah kebijakan dan prioritas pembangunan baru. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk segera menyesuaikan RKPD agar tetap selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta sinergis

dengan kebijakan nasional dan provinsi yang menjadi acuan utama dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan tahun berjalan.

Selain kerangka perencanaan, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 juga merespons terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terhadap prioritas nasional dan hasil Pilkada Serentak 2024. Penyesuaian ini mencakup integrasi isu-isu strategis nasional seperti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta penguatan sektor ketahanan pangan, industri kreatif, dan penciptaan lapangan kerja produktif.

Lebih lanjut, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang tentang Penyesuaian dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, menekankan pentingnya efisiensi anggaran operasional dan optimalisasi alokasi belanja pada sektor prioritas. Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dan mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan *refocusing* belanja ke sektor strategis, membatasi belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas dan honorarium, serta menyesuaikan rencana pendapatan terutama yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini berdampak langsung terhadap struktur dan komposisi belanja dalam dokumen RKPD, sehingga memerlukan penyesuaian melalui proses perubahan.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024 serta realisasi capaian pembangunan hingga Triwulan I Tahun 2025, teridentifikasi adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap sejumlah aspek substansi perencanaan. Sehingga perlunya penyelarasan terhadap indikator kinerja, target

sasaran, prioritas pembangunan, dan alokasi pendanaan, agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kondisi aktual. Penyesuaian ini juga penting untuk memperkuat konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, serta untuk memastikan tercapainya hasil yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Perubahan Renja Tahun 2025 ini juga menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025, serta menjadi bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, penyusunan dokumen ini tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga kesinambungan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas, penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2025 merupakan langkah yang sistematis, terukur, dan berbasis regulasi untuk menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kota. Dokumen ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam melaksanakan pembangunan yang terencana, responsif, dan akuntabel dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6764);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6882);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
 15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045;
 17. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 (dalam proses penetapan);
 18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2025–2045; dan
 19. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
 20. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Tgas, Fungsi dan Rincaian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi;
 21. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 26 tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025
 22. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025–2029 (dalam proses penetapan).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyelaraskan perencanaan

pembangunan tahunan dengan arah kebijakan terbaru sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029, RKP Tahun 2025, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029, dan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029. Perubahan ini juga merupakan tindak lanjut atas arahan Pemerintah Pusat yang dituangkan melalui berbagai regulasi, surat edaran, serta respons terhadap hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah hingga Triwulan I Tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja ini adalah untuk menyesuaikan target pembangunan, prioritas program, dan alokasi pendanaan Tahun Anggaran 2025 agar lebih responsif terhadap dinamika aktual, serta untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Selain itu, dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P), dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih adaptif, tepat sasaran, dan akuntabel.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Dasar Pertimbangan Perubahan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
 - 3.1.1 Faktor-Faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Perubahan
 - 3.1.2 Uraian Garis Besar Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Pemerintah Kota
- 4.2 Prioritas Perangkat Daerah
- 4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting
- 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

1.5 Dasar Pertimbangan Perubahan

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, yang menegaskan pentingnya penyesuaian dokumen RKPD terhadap arah kebijakan terbaru serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun berjalan
- b. Perubahan kepemimpinan yang melahirkan dokumen perencanaan jangka menengah baru, baik di tingkat nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, maupun di tingkat daerah melalui RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029, yang membawa arah kebijakan dan prioritas pembangunan baru

- c. terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terhadap prioritas nasional dan hasil Pilkada Serentak 2024
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang tentang Penyesuaian dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, menekankan pentingnya efisiensi anggaran operasional dan optimalisasi alokasi belanja pada sektor prioritas. Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
- e. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024 serta realisasi capaian pembangunan hingga Triwulan I Tahun 2025, teridentifikasi adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap sejumlah aspek substansi perencanaan. Sehingga perlunya penyesuaian terhadap indikator kinerja, target sasaran, prioritas pembangunan, dan alokasi pendanaan, pada Dinas Pangan dan Pertanian terdapat beberapa yang perlu disesuaikan pada Renja Perubahan diantaranya :
 - 1. Adanya Surat Keputusan Bapanas No.3 Tahun 2025 tentang batas minimum penyediaan beras CPPD Tahun 2025 untuk Kota Cimahi sebesar 64,43 Ton, sementara kondisi eksisting CPPD Kota Cimahi Tahun 2024 50,26 Ton, sehingga direncanakan akan ada penambahan pengadaan CPPD pada Anggaran Perubahan.
 - 2. Untuk mendukung keamanan pangan segar di Kota Cimahi diperlukan alat uji yang lebih modern yang digunakan dalam pengujian residu pestisida

3. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian No.39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten Kota dan Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 26159/Pk.430/F/03/2025 Hal pembentukan Kader pemantauan dan Tindakan Cepat Kejadian Zoonosis (Kader Zoonosis) tanggal 26 maret 2025, mengajukan penambahan untuk pelaksanaan bimbingan teknis kader zoonosis
4. Adanya inpres 1 2025 tentang efisiensi anggaran, sehingga Dinas Pangan dan Pertanian mendapatkan pengalihan anggran hasil efisensi tersebut yang digunakan untuk peningkatan pelayanan kesmavet di Kota Cimahi, UPTD Puskesmas mendapatkan Kajian DED dan Sarana Prasana, dan UPTD BBIAT mendapatka Kajian FS, Probis BLUD dan DED. Adanya Program prioritas Walikota untuk peningkatan PAD , kedua UPTD tersebut sebagai penghasil PAD dari sektor Dinas Pangan dan Pertanian , maka diperlukan peningkatan sarana prasarana.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
TUJUAN III Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah						
SASARAN III.3 Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	77.04 Nilai	78,74	102,20
TUJUAN IV Meningkatnya Kualitas Pembangunan Ekonomi						
SASARAN IV.2 Mempercepat Peningkatan Pemerataan Pendapatan	Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Ekonomi	Kualitas Pembangunan ekonomi	Nilai PPH Ketersediaan	2183 Nilai	2186	100,14
			Skor PPH Ketersediaan	89,6 Nilai	93,9	104,8
			Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1.32 persen	3,80	287,88
TUJUAN V Menurunnya Angka Kemiskinan						
SASARAN V.1 Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasil rendah	Belum optimalnya Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Kemiskinan	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100 persen	100 persen	100

Berdasarkan tabel 1 di atas, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi di Tahun 2024 memiliki 5 Indikator Kinerja Utama, yaitu: Nilai PPH Ketersediaan (Target 2183, Realisasi 2186, Capaian 100,14%), Skor PPH Ketersediaan (Target 89,6,Realisasi 93,9, Capaian 104,8), Persentase Nilai PDRB sektor Pertanian (Target 1,32%, Realisasi 3,80%, Capaian 287,88) Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan (Target

100%, Realisasi 100%, Capaian 100%) Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian (Target 77.04, Realisasi 78,74, Capaian 102,20)

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2024, Pada tahun 2024 Dinas Pangan dan Kota Cimahi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis untuk 3 (tiga) urusan yaitu urusan pangan, pertanian dan perikanan dan kelautan, dan terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU), 1 (satu) IKU untuk urusan pangan dan 4 (empat) IKU untuk urusan pertanian dan urusan kelautan dan perikanan. Adapun evaluasi hasil pencapaian pelaksanaan Renja Tahun 2024 tercantum pada tabel berikut 2.1 berikut :

Tabel 2.1
T.C 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	116,79	BB	0	BB	56,25
		Indeks Profesionalitas ASN	65	68,45	68,5	80	100,66	68,5	0	80	123,08
		Nilai IKM Perangkat Daerah	81	81,07	81,5	82,04	100,00	82	0	82	101,23
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya koordinasi dan dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100,00	100	25	100	56,25
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Forum Perangkat Daerah, jumlah dokumen perencanaan, DPA/RKA murni/perubahan dan jumlah koordinasi terkait perencanaan, DPA/RKA murni/perubahan	12	12	12	12	100,00	12	3	100	56,25
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	4	4	4	4	100,00	4	1	4	56,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	100	100,00	100,00	25	100	56,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	2	2	100,00	2	1	12	56,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	2	2	100,00	2	1	12	56,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan logistik kantor	12	12	2	2	100,00	2	1	12	56,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	2	2	100,00	2	1	12	56,25
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12	12	12	12	100,00	12	3	12	56,25
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	12	12	100,00	12	3	12	56,25
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	2	2	100,00	12	3	12	56,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	100	100	0	0	0,00	100	25	75	56,25
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	1	1	1	56,25
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor/bangunan lainnya	laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor/bangunan lainnya	1	1	0	0	0,00	3	0	0	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	0	0	0,00	100	25	75	56,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan ATK	12	12	12	12	100,00	12	3	12	56,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan bulan Jasa komunikasi jasa air dan listrik	12	12	12	12	100,00	12	3	12	56,25
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	12	12	100,00	12	3	12	56,25
	Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100	100	100	100	100,00	100	25	100	56,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
		Urusan Pemerintahan Daerah									
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	4	4	4	100,00	5	3	4	56,25
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10	2	2	2	100,00	2	1	2	56,25
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rata-rata ketersediaan Energi (kkal/Kap/hari) dan Protein (gr/kap/hari) di Kota Cimahi	E = 2.380 P = 68	E =2.183 P = 68,2	E =2.186 P =75,7	E = 100,13 P = 110,99	E =2.350 P = 67,9	0	0	E=2186 P=75,7	91,84
		Rata-rata konsumsi Energi (kkal/Kap/hari) dan Protein (gr/kap/hari) di Kota Cimahi	E = 2.100 P = 63	E = 1993,4 P = 61,3	E = 1.994 P = 60,7	E = 100,03 P = 106,49	E = 2100 P = 57	0	0	E=1994 P=60,7	96,34
	Keg. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coeficient Varian) Bahan Pahan Pokok	12	12	12	12	100,00	12	3	12	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Sub. Keg. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1	1	1	1	100,00	1	0	1	56,25
	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12	12	12	12	100,00	12	3	12	56,25
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah unit Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	3	19	24	24	100,00	24	7	50	1666,67
	Keg. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan/kebutuhan pangan daerah (%)	25,53	65,31	70	96,65	138,07	100	0	96,65	378,57
	Sub. Keg. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	48	16	20	20	100,00	14	0	36	75,00
	Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPH Konsumsi (skor)	84,2	90,4	90,14	90,14	100,00	90,4	0	90,14	107,05

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Sub. Keg. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah laporan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dok	4	1	2	2	100,00	2	0	3	75
	Sub. Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan	6	8	4	4	100,00	4	1	13	216,67
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin (persen)	100	100	100	100	100,00	100	0	100	50
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan wilayah (kecamatan)	3	3	3	3	100,00	3	0	3	50
	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (dokumen)	4	1	1	1	100,00	1	0	2	50
	Keg. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah penanganan kasus kerawanan pangan (Jumlah KK yang tertangani)	2000	1623	1760	1760	100,00	100	0	3383	169,15
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan,	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan	1	1	3	3	100,00	3	0	4	400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12	12	2	2	100,00	12	3	12	56,25
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	80	98	90	98	108,89	95	0	98	122,50
	Keg. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan ke retail atau pasar (kali)	24	24	12	12	100,00	12	3	39	162,50
	Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (2023)	Jumlah laporan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dok	1	1	0	0	0,00	0	0	1	100,00
	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4	1	1	1	100,00	1	0	2	50,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan	Jumlah laporan Sarana dan Prasarana Pengujian	1	1	12	12	100,00	12	3	16	1600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)									
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Ikan Konsumsi (Ton)	290	289,3	290	290.376	100.13	291	0	290.376	100,13
		Produksi Ikan Hias (Ekor)	2.375.000	2.464.920	2.470.000	2.479.098	100,37	2.480.000	0	2.479.098	104,38
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang diberdayakan (Kelompok)			16	17					
	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (kelompok)	18	15	4	4	100,00	4	0	19	105,56
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih ikan konsumsi yang dihasilkan (ekor)	97.725	110.478	97.725	143.750	147,10	108.000	24.728	278.956	285,45
		Jumlah benih ikan hias yang dihasilkan (ekor)	7.500	9.060	7500	7.780	103,73	8.250	1.958	18.798	250,64

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
		Jumlah penerimaan retribusi (rupiah)	47.000.000	45.516.250	50.000.000	60.472.500	120,95	54.000.000	5.760.000	111.748.750	237,76
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi 5Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (dok)	2	2	2	2	100,00	2	0	2	56,25
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (unit)	4	1	1	1	100,00	1	0	3	50
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan (persen	1	1	2	2	100,00	2	0	2	200
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasar produk hasil perikanan skla mikro dan kecil (UPI)	10	10	10	17	170,00	10	0	27	270,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan	5	1	25	27	108.00	1	0	28	
	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan	Jumlah unit usaha Pengolahan dan						1	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (2025)	Pemasaran hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko									
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana pendukung pertanian (persen)	30	30	30	30	100,00	30	0	30	50
		Jumlah kawasan yang dikelola	1	1	1	1	100,00	1	0	1	50
	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (dokumen)	4	1	1	1	100,00	1	0	2	50
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN	Persentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat	100	100	100	100	100,00	100	0	100	56,25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	veteriner (Jml. Kelurahan yang dilayani)									
	Kegiatan Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi vaksinasi rabies (dosis)	2000	1300	1000	1894	189,40	4240	0	3194	159,70
		Jumlah fasilitasi vaksinasi flu burung (dosis)	1500	600	600	968	161,33	600	0	1568	104,53
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah laporan Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4	4	2	2	100,00	4	0	4	50
	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		4	0	0	0	0	4	1	1	25
	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah hewan kurban yang diperiksa	12000	3613	3000	3870	129,00	3000	0	7483	62,36
		Jumlah pengujian pangan asal hewan	200	10	30	21	70,00	6	28	59	29,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah laporan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4	4	2	2	100,00	4	1	7	175,00
	Keg. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	7000	8007	6500	8937	137,49	7500	2171	19.115	273,07
		Jumlah penerimaan retribusi	303.875.000	325.970.000	275.650.000	361.860.000	131,28	303.215.000	99.485.000	787.315.000	259,09
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	48	12	12	12	100,00	12	3	27	56,25
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	100	100	100	100	100,00	100	25		56,25
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi perizinan	20	9	5	7	140,00	6	0	11	55,00
	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (dok)	20	9	5	7	140	6	0	16	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan & Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12= 11/4
	Teknis Izin Usaha Pertanian										
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	10	11,76	11,76	15	127,55	11,76	0	11,76	117,60
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang naik skor kelompok	17	41	6	11	183,33	6	0	41	241,18
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	33	33	33	33	100,00	33	0	33	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyediaan prasarana pertanian yang dikembangkan (benih, pupuk, obat2 an dan pestisida media tanam)	5	5	6	6	100,00	5	0	11	220,00

Tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan tahun 2024 telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Capaian kinerja program dan kegiatan di Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I bisa dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi
Periode Pelaksanaan s.d. Triwulan I Tahun 2025

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
			K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	TOTAL ANGGARAN				18.032.351.854		2.822.471.006	-	-	-	-	-	-		2.822.471.006		15,65%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.019.447.854												
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				14.019.447.854												
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Nilai	10.920.110.224												
		Nilai IKM Perangkat Daerah	82	Nilai													
		Indeks Profesionalitas ASN	68,50	Nilai													
2.09.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedinya dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen	589.760.700	25	75.840.000	-	-	-	-	-	-	25	75.840.000	25%	13%
2.09.01.2.01.0 001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	55.888.050	3	2.400.000	-	-	-	-	-	-	3	2.400.000	25%	4,29%
2.09.01.2.01.0 006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	24.397.850	1	-	-	-	-	-	-	-	1	73.440.000	25%	14,59%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
2.09.01.2.01.007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	503.474.800	1	73.440.000	-	-	-	-	-	-	1			
2.09.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Gaji ASN	14	Bulan	8.720.819.624	4	1.960.974.176	-	-	-	-	-	-	4	1.960.974.176	4	22,49%
		Jumlah Bulan Tunjangan ASN	12	Bulan		3		-	-	-	-	-	-	3			
2.09.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	Orang/ Bulan	8.720.819.624	50	1.960.974.176	-	-	-	-	-	-	50	1.960.974.176	50	22,49%
2.09.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	80	orang	104.368.000	79	0	-	-	-	-	-	-	79	0	0	0
2.09.01.2.05.002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	31.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.09.01.2.05.011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	55	Orang	72.568.000	53	-	-	-	-	-	-	-	53	0	0	0
2.09.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya penunjang administrasi umum perangkat daerah	12	Bulan	610.638.150	3	124.793.319	-	-	-	-	-	-	3	124.793.319	25%	20,34%
2.09.01.2.06.001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	9.890.000	1	9.115.000	-	-	-	-	-	-	1	9.115.000	50%	92,16%
2.09.01.2.06.002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor	2	Paket	269.089.400	1	34.113.400	-	-	-	-	-	-	1	34.113.400	50%	12,68%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
		kantor yang disediakan															
2.09.01.2.06.004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik kantor yang disediakan	2	Paket	37.424.000	1	6.243.000	-	-	-	-	-	-	1	6.243.000	50%	16,68%
2.09.01.2.06.005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket	15.198.750	1	3.963.200	-	-	-	-	-	-	1	3.963.200	50%	26,08%
2.09.01.2.06.008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	2	Laporan	12.474.000	0	2.760.000	-	-	-	-	-	-	0	2.760.000	0	22,13%
2.09.01.2.06.009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	210.650.000	3	66.753.000	-	-	-	-	-	-	3	66.753.000	3	31,26%
2.09.01.2.06.011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Peerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	55.912.000	0	1.845.719	-	-	-	-	-	-	2	1.845.719	0	3,30%
2.09.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah dukungan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	12	Bulan	417.360.000	3	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.09.01.2.07.001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	167.400.000	3	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.09.01.2.07.011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	249.960.000	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.09.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase tersedianya jasa	12	Bulan	353.517.000	3	96.759.669	-	-	-	-	-	-	3	96.759.669	25%	27,37%

[illegible]

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
	KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Protein (gr/kap/hari) di Kota Cimahi	Protein = 67.9	gr/kkal/ hari													
		Rata-rata konsumsi Energi (kkal/Kap/hari) dan Protein (gr/kap/hari) di Kota Cimahi	Energi = 2100 Protein = 57	kkal/kap /hari gr/kkal/ hari													
2.09.03.2.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coeficent Varian) Bahan Pangan Pokok	12	Laporan	289.598.350	3	54.713.739	-	-	-	-	-	-	3	54.713.739	25%	18,89%
2.09.03.2.01.0 01	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	24	unit	186.257.800	7	53.256.739	-	-	-	-	-	-	7	53.256.739	29%	28,59%
2.09.03.2.01.0 012	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Neraca Bahan Makanan (Dok NBM)	1	Laporan	8.898.000	0	630.000	-	-	-	-	-	-	0	630.000	0	
2.09.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan/kebut uhan pangan daerah)	100	Persen	267.557.980	0	0	-	-	-	-	-	-	0	65.211.100		
2.09.03.2.02.0 003	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14	Ton	267.557.980	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
	Pemerintah Kabupaten/Kota																
2.09.03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPh Konsumsi(Skor)	90,14	Skor	492.991.500	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2.09.03.2.04.0 001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dok)	2	Dokumen	177.054.000	0	4.524.000	-	-	-	-	-	-	0	4.524.000	0	2,56%
2.09.03.2.04.0 002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	4	Laporan	315.937.500	1	60.687.100	-	-	-	-	-	-	1	60.687.100	0	19,21%
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100	Persen													
2.09.04.2.01	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan wilayah penanganan kerawanan pangan (Kecamatan)	3	Kecamata n													
2.09.04.2.01.0 001	Sub Kegiatan Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan (Dok)	1	Dokumen	19.157.300	0	0	-	-	-	-	-	-	-	19.157.300	0	0%
2.09.04.2.02	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah penanganan kasus	100	Persen	1.877.838.400	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
	Kewenangan Kabupaten /Kota	kerawanan pangan (KK)															
2.09.04.2.02.0 002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Dokumen	1.868.871.000	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.09.04.2.02.0 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12	Laporan	8.967.400	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	95	Persen	128.011.100	0	80.111.400								80.111.400	0	63%
2.09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan ke retail atau pasar (kali)	12	Kali	128.011.100	3	80.111.400								80.111.400	25%	63%
2.09.05.2.01.0 004	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	28.743.600	0	1.680.000	-	-	-	-	-	-	0	1.680.000	0	0%
2.09.05.2.01.0 007	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen	99.267.500	3	78.431.400	-	-	-	-	-	-	3	78.431.400	25%	79,01%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.881.249.000		235.396.847	-	-	-	-	-	-		235.396.847	0	6,06%
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.034.642.100		128.028.341	-	-	-	-	-	-		128.028.341	0	12,37%
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi ikan Konsumsi (Ton)	291	Ton	819.338.900	75,90	113.159.741	-	-	-	-	-	-		113.159.741	75,90	13,81%
		Produksi Ikan Hias (ekor)	2.480. 000	Ekor		682.020								682.0 20		28%	
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang diberdayakan (Kelompok)	1	Kelompok													
3.25.04.2.02.0 004	Sub Kegiatan Pemberian pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi serta penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4	Pendamp ingan	245.000.000	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0%
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih ikan konsumsi yang dihasilkan (ekor)	108.00 0	Ekor	574.338.900	24728	113.159.741	-	-	-	-	-	-	24728	113.159.741	23%	20%
		Jumlah benih ikan hias yang dihasilkan (ekor)	8.250	Ekor		1958										24%	
		Jumlah penerimaan retribusi (rupiah)	54.000 .000	Rupiah		5.760.00 0										11%	
3.25.04.2.04.0 001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan	2	Dokumen	4.999.750	0	1.334.350	-	-	-	-	-	-	0	1.334.350	0	26,69%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
	Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
3.25.04.2.04.0 003	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	1	unit	569.339.150	0	111.825.351	-	-	-	-	-	-	0	111.825.351	0	19,64%
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan	2	Persen	215.303.200	0	14.868.600	-	-	-	-	-	-	0	14.868.600	0	6,91%
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha Pengolahan dan Pemasar Produk Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil (UPI)	10	Unit Pengolah Ikan (UPI)	215.303.200	0	14.868.600	-	-	-	-	-	-	0	14.868.600	0	6,91%
3.25.06.2.02.0 002	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah unit usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	1	Unit usaha	215.303.200	0	14.868.600	-	-	-	-	-	-	0	14.868.600	0	6.91%
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN	Persentase Prasarana Pertanian	30%	Persen	49.999.750	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
	DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	yang disediakan dan dikembangkan (%)															
3.27.03.2.01	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kawasan	1	Kawasan	49.999.750	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
3.27.03.2.01.0 015	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B yang Dikelola (dok)	1	Dokumen	49.999.750	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Jumlah Kelurahan yang dilayani)	100	Persen	1.357.656.400	0	0	-	-	-	-	-	-	107.1 65.84 9	0		7,89%
3.27.04.2.01	Kegiatan Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang divaksinasi menular dalam Daerah kabupaten/Kota (kelurahan) Rabies	4240	Dosis		0	0	-	-	-	-	-	-	0	0		
3.27.04.2.01.0 008	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1	Flu Burung Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan	600 4	Dosis Laporan	300.124.200	1	25.214.250	-	-	-	-	-	-	1	25.214.250	25%	8,40%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota	menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
3.27.04.2.02	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan qurban yang diperiksa (ekor)	3000	ekor		0	2.305.000	-	-	-	-	-	-	0	2.305.000	0	4,33%
		Jumlah Pengujian pangan asal hewan (sample)	6	sample		0	0	-	-	-	-	-	-	0			
3.27.04.2.02.0 006	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	4	laporan	53.212.000	1	2.305.000	-	-	-	-	-	-	1	2.305.000	25%	4,33%
3.27.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	7500	Ekor	1.004.320.200	2171	79.646.599	-	-	-	-	-	-	2171	79.646.599	29%	7,93%
		Jumlah penerimaan Retribusi kabupaten/Kota	303.21 5.000	Rupiah		99.485.0 00		-	-	-	-	-	-	99.48 5.000		33%	
3.27.04.2.03.0 002	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah laporan pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan		3	79.646.599	-	-	-	-	-	-	3	79.646.399	25	7.93%
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	100	Persen	9.411.700	0	1.989.905	-	-	-	-	-	-	0	1.989.905	0	21,14%
3.27.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam	Jumlah Rekomendasi perizinan (Rekomendasi)	6	Rekomen dasi	9.411.700	0	1.989.905	-	-	-	-	-	-	0	1.989.905	0	21,14%

Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
	Daerah Kabupaten/Kota																
3.27.06.2.01.0 002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (dok)	6	Dok	9.411.700	0	1.989.905	-	-	-	-	-	-	0	1.989.905	0	21,14%
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	11,76	Persen	1.565.576.050	0	43.982.193	-	-	-	-	-	-	0	43.982.193	0	2,81%
3.27.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik skor kelompok (kelompok)	6	Kelompok	1.565.576.050	0	43.982.193	-	-	-	-	-	-	0	43.982.193	0	2.81%
3.27.07.2.01.0 002	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	33	unit	101.999.750	8	10.220.000	-	-	-	-	-	-	8	10.220.00	24%	10,02%
3.27.07.2.01.0 003	Sub Kegiatan Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5	unit	1.463.576.300	0	33.762.193	-	-	-	-	-	-	0	33.762.193	0	2,31%

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi mengampu tiga urusan pemerintahan yaitu urusan pangan, urusan pertanian dan urusan kelautan dan perikanan. Alokasi anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp.17.771.448.854 untuk anggaran Murni dan Rp. 18.032.351.854 untuk Anggaran Parsial 1 urusan wajib pangan yang didalamnya termasuk anggaran sekretariat dan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 2.541.304.758 atau 18,13% anggaran tersebut terdistribusi untuk 4 program, 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Untuk urusan Pertanian teralokasi anggaran sebesar Rp. 2.982.703.900 dengan realisasi sebesar Rp. 153.137.947 atau 5,13% anggaran tersebut terdistribusi untuk 4 program, 5 kegiatan dan 7 sub kegiatan, untuk urusan Perikanan dan Kelautan teralokasi anggaran sebesar Rp. 1.034.642.100 dengan realisasi sebesar Rp. 128.028.310,- atau 12,37% anggaran tersebut terdistribusi untuk 2 program 3 kegiatan 4 sub kegiatan Untuk realisasi anggaran pada Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 2.822.471.006 atau sebesar 15,65%.

Dari Anggaran Murni ke Anggaran Parsial 1 terdapat perubahan anggaran dikarenakan adanya efisiensi untuk perjalanan Dinas, ada penambahan anggaran pada UPTD BBIAT sebesar RP.100.000.000 untuk Kajian peningkatan potensi PAD , ada penambahan anggaran pada UPTD Puskesmas sebesar Rp.170.000.000 untuk alat medis dan Kajian DED, juga ada penambahan anggaran untuk Tenaga Harian Lepas sebanyak 2 bulan.

Hasil Pembahasan Monev Triwulan I

1. Bidang Ketahanan Pangan

Terdiri dari Program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan

- a. Untuk Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
Ada Surat Keputusan Bapanas No.3 Tahun 2025 tentang batas minimum penyediaan beras CPPD Tahun 2025 untuk Kota Cimahi sebesar 64,43 Ton, sementara kondisi eksisting CPPD Kota Cimahi Tahun 2024 50,26 Ton, DPA tahun 2025 , beras

yang diajukan 13, 3 ton belum mencapai standar minimal dari Bapanas sehingga perlu penambahan

- b. Pada Triwulan I telah dilaksanakan Sosialisasi B2SA dilaksanakan di 2 sekolah (SD Cibabat Mandiri 1 dan SD Cimahi Mandiri 3)
- c. Kegiatan pengadaan susu, telur, dan beras fortivit.
Untuk pengadaan fortivit sebagian dari DIF, sebagian dari APBD, susu dan telur dari APBD, Kegiatan baru persiapan dengan mengeluarkan Surat Permohonan Data Ibu hamil menyusui/dan Baduta ke Dinas Kesehatan Kota Cimahi Koordinasi dengan pihak Bulog Kancab Bandung tentang harga beras Fortivit
- d. Pelaksanaan Uji Mutu Pangan Segar sudah dilaksanakan diPasar Atas, Superindo, Yogya, Gerakan Pangan Murah (GPM) di Melong dan Pasar Antri
Untuk mendukung keamanan pangan segar di Kota Cimahi diperlukan alat uji yang lebih modern yang digunakan dalam pengujian residu pestisida

2. Bidang Pertanian dan Perikanan

- a. Adanya arahan untuk pembentukan kader zoonosis Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian No.39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten Kota dan Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 26159/Pk.430/F/03/2025 Hal pembentukan Kader pemantauan dan Tindakan Cepat Kejadian Zoonosis (Kader Zoonosis) tanggal 26 maret 2025, mengajukan penambahan untuk pelaksanaan bimbingan teknis kader zoonosis sebesar Rp.20.000.000
- a. Capaian pelayanan Puskesmas dari target 7500 ekor pada Triwulan I telah tercapai 2.171 ekor dan untuk pendapatan dari taget 303.215.000 telah tercapai 99.485.000 atau sekitar 33 persen

- b. Telah dilaksanakan sosialisasi Gerakan masyarakat makan ikan (GEMARIKAN) dan sekolah berkebun di 2 sekolah yaitu SD Cibabat Mandiri I dan Cibabat Mandiri 3)

Faktor Pendorong

1. Koordinasi antar bidang pada Dinas Pangan dan Pertanian
2. Untuk pelaksanaan bazar pangan murah adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait (kelurahan dan RW) antusias dari masyarakat
3. Adanya Surat Keputusan Bapanas No 3 Tahun 2025 tentang batas minimum penyediaan beras CPPD Tahun 2025, untuk Cimahi sebesar 64,43 Ton
4. Adanya Peraturan Menteri Pertanian No.39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten Kota dan Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 26159/Pk.430/F/03/2025 Hal pembentukan Kader pemantauan dan Tindakan Cepat Kejadian Zoonosis (Kader Zoonosis) tanggal 26 maret 2025

Faktor Penghambat

1. Kendala pada sistem pengadaan
2. Menunggu jawaban standar harga beras medium dan beras Fortivit untuk CPPD belum ada jawaban, Data CPCL Penerima dari kelurahan belum terkumpul semua
3. Jenis sample masih terbatas belum semua jenis pangan segar bisa di sample (misalnya rempah, jamur, kacang2an belum ada alat uji nya)

Tindak Lanjut

1. Koordinasi dengan PBJ untuk proses pengadaan barang dan Jasa
2. Koordinasi dengan TAPD terkait kegiatan yang berkaitan dengan Surat Keputusan Bapanas dan Menteri Pertanian
3. Koordinasi lanjutan dengan pihak BULOG untuk mengawal pengadaan CPPD dan beras Fortivit.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.3
T.C.30 pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi awal kinerja awal RPD	Target				Realisasi		Target Renstra Tahun 2026	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Renstra Tahun 2026 (%)
				2023	2024	2025	2026	2023	2024		
1	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Nilai PPH Ketersediaan (Nilai)	2136	2350	2350	2380	2380	2183	2186	2380	91,84
		Skor PPH Ketersediaan (Skor)	90,4	67,9	68	68	68	89,6	93,9	68	138,08
		Prosentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian (persen)	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,55	3,80	1,32	287,87
2	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan (persen)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian (nilai)	22,79	30	30	35	45	77	78,74	45	174,97

Pada tahun 2024 untuk pencapaian indikator setingkat sasaran strategis terdapat beberapa indikator yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu (1). Skor PPH ketersediaan, yang capaiannya 93,9 dari target skor yang ditetapkan yaitu 68 tercapai sebesar 138,08 % (2). Prosentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian yang capaiannya 287,87 %, lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu 1,32% dan nilai evaluasi reformasi birokrasi Dispangtan yang capaiannya 78,74 dari target yang telah ditetapkan di awal perencanaan yaitu 45.

Adapun capaian strategis yang sesuai dilaksanakan seperti target yang telah direncanakan di awal perencanaan adalah Cakupan PPKS yang

mendapatkan bantuan kerawanan pangan yaitu sebesar 100% telah dilaksanakan.

Capaian strategis yang belum tercapai yaitu Nilai PPH ketersediaan hanya tercapai 2186 dari nilai target yang telah ditetapkan yaitu 2350.

Secara keseluruhan 90% capaian indikator di lingkup indikator sasaran strategis di Dinas Pangan dan Pertanian tercapai.

Untuk capaian program Tahun 2024 sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Dengan Indikator Program Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 71 (BB) tercapai (77) Nilai, Nilai IKM Perangkat Daerah dari Target 81,5 tercapai 82,04 , Indeks Profesional ASN dari target 68,5 tercapai 80 Nilai, dengan Anggaran Rp. 10.646.755.649 tercapai Rp.10.368.456.628 atau 97% dengan kegiatan Sarana dan Prasarana serta Fasilitasi kegiatan rutin, perencanaan dan penganggaran, Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Indikator Program Rata- rata Ketersediaan Energi dari target 2183 kkal/kap/hari tercapai 2186 kkal/kap/hari, Ketersediaan Protein dari target 68,2 gr/kkal/hari tercapai 75,7 gr/kkal/hari, ketersediaan energi total pada wilayah Kota Cimahi pada tahun 2024 adalah 2186 kkal/kap/hari sedikit lebih rendah dari standar ideal yang ditetapkan WNPG sebesar 2400 kkal/kapita/hari, hal ini menunjukkan pencapaian persentase AKE 91,1% masih terdapat kekurangan sebesar 8,9 % untuk mencapai standar yang ditetapkan, Ketersediaan protein total tercatat sebesar 75.7 gr/kapita/hari yang melampaui standar ideal 63 g/kapita/hari yaitu sebesar 120,2% AKP.

Indikator kedua pada program ini adalah Rata-rata konsumsi Energi dengan target 1993,4 kkal/kapita/hari tercapai sebesar 1994 kkal/kapita per hari , untuk Rata rata konsumsi Protein dari target 57 gr/kapita/hari tercapai 60,7 gr/kap/hari. Jumlah Konsumsi pangan penduduk Kota Cimahi diketahui dari konsumsi Energi (kkal/kap/hari) dan Protein (kkal/kap/hari), dimana untuk tahun 2024 capaian konsumsi Energi sebesar 1994 kkal/kapita/hari masih belum mencapai standar ideal yang ditetapkan WNPG (Widyakarya Pangan dan Gizi)

yaitu sebesar 2150 kkal/kapita/hari, untuk capaian konsumsi Protein Kota Cimahi sebesar 60,7 gr/kap/hari telah melampaui standar ideal sebesar 57 gr/kap/hari. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung program ini diantaranya :

- a. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan tujuan untuk menstabilkan harga pangan, menjaga daya beli masyarakat, menjamin ketersediaan pangan pokok dengan harga terjangkau yang pada tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 24 kali dari target 24 kali , selain itu ada GPM dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 5 kali dan dari Pusat 1 kali dengan total pelaksanaan GPM 30 kali pada tahun 2024
- b. Pemantuan Stok dan pasokan dan harga pangan yang dilaksanakan rutin ke pasar tradisional dan toko modern
- c. Penyusunan Kajian Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH Ketersediaan Kota Cimahi dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi ketahanan pangan berdasarkan dimensi ketersediaan kepada pengambil kebijakan bagi Pemerintah Kota Cimahi yang memuat Skor PPH Ketersediaan, Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) dan Ketersediaan Protein (gr/kapita/hari)
- d. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPPD), berdasarkan ketentuan Bapanas Nomor 15 Tahun 2023 bahwa Kota Cimahi untuk Tahun 2024 harus memenuhi kuota CPPD beras minimal sebanyak 52 Ton. Kota Cimahi untuk Tahun 2024 sudah mencapai 53,96 Ton dikurangi adendum dari Bulog untuk beras yang telah dititipkan leboh dari satu tahun lebih sebelumnya sebanyak 33,96 Ton (dikurangi adendum sebanyak 3,7 Ton) sehingga CPPD Kota Cimahi menjadi 30,26 Ton, pengadaan Tahun 2024 sebanyak 20 Ton, sehingga total CPPD Kota Cimahi sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 50,26 Ton atau sebesar 96,65% dari ketentuan Bapanas.
- e. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi pangan per Kapita Per tahun yaitu untuk memberikan gambaran tentang situasi konsumsi pangan penduduk sebagai output pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Cimahi dengan hasil kegiatan berupa perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Konsumsi Energi

- (kkal/kapita/hari), Konsumsi Protein (gr/kapita/hari), kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan PPH Konsumsi Tahun 2024 diantaranya Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan Masyarakat melalui B2SA Go To School yang pada Tahun 2024 sudah dilaksanakan di 20 Sekolah
- f. Pemberdayaan masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal yang merupakan salah satu upaya meningkatkan PPH Konsumsi Kota Cimahi dengan kegiatan Solmet (Sosialisasi Menu Sehat) di 2 Kelurahan dan kegiatan diversifikasi pangan pada pelaku usaha Mocaf dan Abon Cabai.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan indikator persentase jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani dari 100 persen tercapai 100 persen dengan kegiatan pendukung diantaranya:
 - a. Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dengan tujuan untuk menggambarkan visualisasi Geografis dari hasil data indikator Kerentanan terhadap kerawanan pangan untuk pengentasan daerah rawan pangan, pemangku kepentingan dapat segera membuat kebijakan mengenai ketahanan pangan dan gizi
 - b. Sesuai dengan Perda No. 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Perwal No.65 Tahun 2021 tentang Penyaluran CPPD, bahwa Sasaran CPPD diperuntukan bagi masyarakat Daerah yang mengalami rawan pangan, rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk, pada tahun 2024 kegiatan yang dilaksanakan adalah intervensi bagi ibu hamil dan menyusui serta baduta yang terindikasi stunting berupa beras Fortivit bagi ibu hamil, menyusui sebanyak 1.490 orang atau sebanyak 44.700 kg/bulan selama 6 bulan, baduta beras Fortivit sebanyak 270 orang sebanyak 8.100 Kg/Bulan dan untuk baduta diberikan juga susu dan telur
 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan indikator program persentase pangan segar yang aman dikonsumsi dengan capaian 98 persen dari target 90 persen dengan kegiatan berupa
 - a. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk menjamin keamanan dan

- mutu pangan segar yang diproduksi oleh UMK, mendukung pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi standar keamanan pangan nasional, pada tahun 2024 dilaksanakan pada 6 Pelaku usaha di Kota Cimahi, Rekomendasi sebanyak 50 nomor registrasi.
- b. Pelaksanaan uji mutu pangan segar dengan tujuan meningkatkan mutu dan keamanan pangan di Kota Cimahi uji mutu yang dilaksanakan yaitu uji Pestisida, Formalin dan Timbal pada pangan segar, pada tahun 2024 sudah dilaksanakan 12 kali uji keamanan pangan segar dengan minimal 10 sample di pasar tradisional dan pasar modern.
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator program Produksi Ikan Konsumsi dari target 290 Ton tercapai 290.367 Ton, Produksi ikan Hias dari target 2.470.000 tercapai 2.479.098 ekor dengan kegiatan berupa
- a. pendampingan ke pelaku usaha/pokdakan ikan konsumsi dan ikan hias, pengadaan sarana dan prasarana untuk KWT dan kelompok berupa budikdamber (induk Ikan lele, benih nila, benih lele, pakan dan ember)
- b. Penyediaan data dan Informasi Pembudiaya Ikan dengan pelaksanaan kegiatan yaitu data setiap bulan diinput ke Satu Data KKP sebanyak 3 data (data pembenihan, pembesaran dan ikan hias) ke Dirjen DJPB dan 2 data (UPI Mikro dan UPPN ke Dirjen Pengolahan Daya Saing Hasil Perikanan proses validasi dilaksanakan setiap semester.
- c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan yang kegiatannya pada UPTD BBIAT, pada tahun 2024 jumlah benih ikan konsumsi (Ikan Nila dan Ikan Lele) yang dihasilkan sebanyak 143.750 ekor dari target 97.725 ekor, Jumlah benih ikan hias (Corydoras Panda, Frontosa, Koi) yang dihasilkan sebanyak 7.780 ekor dari target 7.500 ekor dan jumlah penerimaan retribusi sebesar Rp.60.472.500 dari target Rp.50.000.000,-
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil (UPI) dari target 2 persen tercapai 2 persen dengan kegiatan berupa

- a. Diversifikasi olahan ikan dan demo masak olahan ikan, pelatihan sertifikat kelayakan pengolahan yang pada tahun 2024 dihadiri oleh 20 UPI, Sosialisasi Gemarikan yang dilaksanakan di sekolah dengan tujuan untuk menanamkan pola makan sehat sejak dini, membiasakan anak-anak makan ikan sejak dini, meningkatkan kesadaran akan manfaat ikan
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan indikator program persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan dengan capaian 30 persen dari target 30 persen kegiatan berupa pembuatan DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) untuk LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dengan tujuan melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali, mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan, mengendalikan alih fungsi lahan, mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner dengan indikator persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan capaian 100 persen dari target 100 persen, kegiatan yang mendorong program ini berupa :
 - a. Vaksinasi rabies dan Flu burung, pada tahun 2024 dari target 1000 dosis tercapai 1894 dosis untuk vaksinasi rabies dan 968 dosis dari target 600 dosis untuk flu burung
 - b. Pemeriksaan hewan qurban yang sudah dilaksanakan sebanyak 3870 ekor dari target 3000 ekor hewan qurban
 - c. Pengujian sample pangan asal hewan yang pada tahun 2024 sudah dilaksanakan sebanyak 21 sample pangan asal hewan (daging sapi, daging ayam, abon sapi, abon ayam dan bakso) dengan tujuan masyarakat Kota Cimahi dijamin mengkonsumsi pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal
 - d. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang berada di UPTD Puskesmas, pada tahun 2024 jumlah hewan yang dilayani sebanyak 8937 ekor dari target 6500 ekor, untuk jumlah penerimaan retribusi pada UPTD Puskesmas sebesar Rp. 361.860.000 dari target Rp.275.650.000

9. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan indikator persentase izin usaha pertanian yang dilayani dari target 100 persen tercapai 100 persen dengan kegiatan berupa
 - a. Sosialisasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner) untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya standar higiene dan sanitasi dalam unit usaha produk hewan, menjamin keamanan pangan asal hewan, mendukung legalitas dan daya saing produk, mengurangi risiko penyakit zoonosis
 - b. Rekomendasi perizinan, tahun 2024 yang sudah mendapatkan rekomendasi yaitu : drh.Manik, Drh Jemmima, PT. Diamond, CV. Cimahi, PT Sukandajaya, PT Yoga Adiputra Perkasa, dan Drh. Rio
10. Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas dengan capaian 15 persen dari target 11,76 persen, kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung program ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pendampingan kepada kelompok tani yang pada tahun 2024 sudah dilaksanakan sebanyak 33 kali media pembelajaran urban farming , peningkatan produksi pertanian dan sosialisasi budidaya pertanian untuk anak sekolah
 - b. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian sebanyak 6 unit diantaranya bibit tanaman, koloni lebah, obat-obatan, benih tanaman horti, sarana prasarana produksi pertanian berupa polybag dan media tanam dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal, mengoptimalkan pemanfaatan lahan sempit dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Dinas Pangan dan Pertanian merupakan salah satu SKPD yang keberadaannya diatur secara legal-formal dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Baru (Lembar Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207).

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Cimahi masih terdapat kendala diantaranya :

1. Maraknya alih fungsi lahan pertanian;
2. Keterbasan literasi finansial petani;
3. Para pelaku usaha pertanian masih berfikir konvensional (gagap teknologi);
4. Masalah klasik pasca panen (anjloknya harga jual);
5. Ketidakstabilan harga dan pasokan pangan daerah;
6. Cadangan pangan pemerintah yang belum memadai (belum sesuai standar Bapanas);
7. Keterjangkauan konsumsi pangan masyarakat tidak merata karena kesenjangan daya beli masyarakat dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pola konsumsi ideal yang belum merata.
8. Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
9. Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat;
10. Masih terdapat masyarakat miskin dan rawan pangan dan kasus stunting di Kota Cimahi;
11. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja ;
12. Sarana prasarana kinerja belum memadai;
13. Kompetensi aparatur belum memadai;

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, maka selayaknya usulan/keinginan masyarakat dapat tertuang ke dalam Rencana Kerja Dinas. Anggaran yang ada semampu mungkin dimaksimalkan untuk bisa mengakomodir aspirasi masyarakat dan juga diselaraskan dengan kebutuhan pada rencana kerja dinas guna mendukung pencapaian misi dan visi Kota Cimahi dan tema pembangunan di 2025 yaitu *"Perwujudan stabilitas perekonomian dan peningkatan daya saing sumber daya manusia"*.

Adapun analisis kebutuhan anggaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi adalah sebagaimana diuraikan pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

RKPD Perubahan Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Perubahan 2025	Pagu Indikatif	
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN				18.252.491.854	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN				18.252.491.854	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.283.699.704	14.283.699.704	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.283.699.704	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			14.283.699.704	14.283.699.704	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			14.283.699.704	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	68,5	10.954.559.274	2.09.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	80	10.954.559.274	
		Nilai IKM Perangkat Daerah	82				Nilai IKM Perangkat Daerah	82,1		
		Nilai SAKIP Perangkat daerah	BB				Nilai SAKIP Perangkat daerah	77,95 BB		
2.09.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya dokumen koordinasi dan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	589.760.700	2.09.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya dokumen koordinasi dan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	589.760.700	
2.09.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dok	83.299.850	2.09.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dok	83.299.850	
2.09.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	29.017.850	2.09.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	29.017.850	
2.09.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	488.266.800	2.09.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	488.266.800	
2.09.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji ASN dan P3K (kali)	14 kali	8.720.819.624	2.09.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji ASN dan P3K (kali)	14 kali	8.720.819.624	
		Tersedianya Tunjangan ASN dan P3K (kali)	12 kali				Tersedianya Tunjangan ASN dan P3K (kali)	14 kali		
2.09.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan	8.720.820.024	2.09.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan	8.720.820.024	
2.09.01.2.05	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian untuk pengembangan kompetensi	80 orang	104.368.000	2.09.01.2.05	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian untuk pengembangan kompetensi	80 orang	104.368.000	

RKPD Perubahan Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Perubahan 2025	Pagu Indikatif	
2.09.01.2.05.002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	2.09.01.2.05.002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	
2.09.01.2.05.011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	72.568.000	2.09.01.2.05.011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	72.568.000	
2.09.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan dukungan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	613.528.150	2.09.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan dukungan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	613.528.150	
2.09.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.340.000	2.09.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.340.000	
2.09.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	336.263.400	2.09.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	336.263.400	
2.09.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.335.350	2.09.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.335.350	
2.09.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19.335.350	2.09.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19.335.350	
2.09.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	8.400.000	2.09.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	8.400.000	
2.09.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	210.270.000	2.09.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	210.270.000	
2.09.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	39.468.000	2.09.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	39.468.000	
2.09.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dukungan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	12 bulan	417.360.000	2.09.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dukungan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	12 bulan	417.360.000	
2.09.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jab	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	167.400.000	2.09.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jab	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	167.400.000	
2.09.01.2.07.0011	Sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	4 bulan	286.389.000	2.09.01.2.07.0011	Sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	4 bulan	286.389.000	

RKPD Perubahan Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Perubahan 2025	Pagu Indikatif	
	Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan					Bangunan Lainnya yang Disediakan			
2.09.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	286.389.000	2.09.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	286.389.000	
2.09.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000	2.09.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000	
2.09.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.337.000	2.09.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.337.000	
2.09.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	184.414.000	2.09.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	184.414.000	
2.09.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	187.884.750	2.09.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	187.884.750	
2.09.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	157.745.000	2.09.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	157.745.000	
2.09.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	23.510.000	2.09.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	23.510.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rata-rata ketersediaan Energi dan Protein di Kota Cimahi	E= 2183 P = 68,2	1.200.749.830	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rata-rata ketersediaan Energi dan Protein di Kota Cimahi	E= 2183 P = 68,2	1.200.749.830	
		Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein di Kota Cimahi	E=1964 P=57				Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein di Kota Cimahi	E=1964 P=57		
2.09.03.2.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coeficient Varian) Bahan Pahan Pokok	12 Dokumen	293.144.350	2.09.03.2.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coeficient Varian) Bahan Pahan Pokok	12 Dokumen	293.144.350	
2.09.03.2.01.00010	Sub Kegiatan Pengembangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	24 Unit	179.523.800	2.09.03.2.01.00010	Sub Kegiatan Pengembangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	24 Unit	179.523.800	

RKPD Perubahan Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Perubahan 2025	Pagu Indikatif	
	Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota					Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota				
2.09.03.2.01.00012	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	38.042.000	2.09.03.2.01.00012	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	38.042.000	
2.09.03.2.01.00015	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	53.297.550	2.09.03.2.01.00015	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	53.297.550	
2.09.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan /kebutuhan pangan dalam daerah	100 Persen	270.977.980	2.09.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan /kebutuhan pangan dalam daerah	100 Persen	270.977.980	
2.09.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25,3 Ton	447.557.980	2.09.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25,3 Ton	447.557.980	
2.09.03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPH konsumsi	90,14 Skor	470.440.500	2.09.03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPH konsumsi	90,14 Skor	470.440.500	
2.09.03.2.04.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	177.054.000	2.09.03.2.04.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	177.054.000	
2.09.03.2.04.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	305.274.500	2.09.03.2.04.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	305.274.500	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100 Persen	1.902.299.500	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100 Persen	1.902.299.500	
2.09.04.2.01	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan wilayah	3 Kecamatan	20.177.300	2.09.04.2.01	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan wilayah	3 Kecamatan	20.177.300	
2.09.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	19.157.300	2.09.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	19.157.300	

RKPD Perubahan Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Perubahan 2025	Pagu Indikatif	
2.09.04.2.02	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100 Persen	1.916.586.400	2.09.04.2.02	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100 Persen	1.916.586.400	
2.09.04.2.02.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.868.870.800	2.09.04.2.02.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.868.870.800	
2.09.04.2.02.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12 Laporan	14.271.400	2.09.04.2.02.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12 Laporan	14.271.400	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	95 Persen	226.051.100	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	95 Persen	226.051.100	
2.09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan ke retail/pasar	12 kali	128.011.100	2.09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan ke retail/pasar	12 kali	128.011.100	
2.09.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28.743.600	2.09.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28.743.600	
2.09.05.2.01.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	12 Dokumen	197.307.500	2.09.05.2.01.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	12 Dokumen	197.307.500	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.968.792.150	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			991.844.100	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi ikan hias Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	2.480.000 ekor 291 ton	776.540.900	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi ikan hias Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	2.480.000 ekor 291 ton	776.540.900	
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya ikan yang diberdayakan	16 Kel	245.000.000	3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya ikan yang diberdayakan	16 Kel	245.000.000	
3.25.04.2.02.0004	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				3.25.04.2.02.0004	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				

RKPD Perubahan Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Perubahan 2025	Pagu Indikatif	
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih ikan hias yang dihasilkan Jumlah benih ikan konsumsi yang dihasilkan Jumlah penerimaan retribusi	108.000 ekor 8250 ekor 54.000.000	445.090.900	3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih ikan hias yang dihasilkan Jumlah benih ikan konsumsi yang dihasilkan Jumlah penerimaan retribusi	108.000 ekor 8250 ekor 54.000.000	445.090.900	
3.25.04.2.04.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.999.750	3.25.04.2.04.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.999.750	
3.25.04.2.04.0009	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	526.541.150	3.25.04.2.04.0009	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	526.541.150	
25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil	2 Persen	215.303.200	25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil	2 Persen	215.303.200	
25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasar produk hasil perikanan skla mikro dan kecil	10 UPI	215.303.200	25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasar produk hasil perikanan skla mikro dan kecil	10 UPI	215.303.200	
25.06.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 unit usaha	215.303.200	25.06.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 unit usaha	215.303.200	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	30 persen	16.399.750	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	30 persen	16.399.750	
3.27.03.2.01	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kawasan	1 Kawasan	16.399.750	3.27.03.2.01	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kawasan	1 Kawasan	16.399.750	
3.27.03.2.01.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B	1 Dokumen	16.399.750	3.27.03.2.01.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan	1 Dokumen	16.399.750	

RKPD Perubahan Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Perubahan 2025	Pagu Indikatif	
	Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola			
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100 persen	1.390.248.400	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100 persen	1.390.248.400	
3.27.04.2.01	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang divaksinasi (Rabies)	4240 Dosis	300.124.200	3.27.04.2.02	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang divaksinasi (Rabies)	3350 Dosis	300.124.200	
		Jumlah Hewan yang divaksinasi (flu burung)	600 Dosis				Jumlah Hewan yang divaksinasi (flu burung)	600 Dosis		
3.27.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	345.444.200	3.27.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	345.444.200	
3.27.04.2.02	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan kurban yang diperiksa	3000 ekor	53.212.000	3.27.04.2.02	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan kurban yang diperiksa	3000 ekor	53.212.000	
		Jumlah pengujian pangan asal hewan	6 sample				Jumlah pengujian pangan asal hewan	6 sample		
3.27.04.2.02.0006	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	4 laporan	53.212.000	3.27.04.2.02.0006	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	4 laporan	53.212.000	
3.27.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dilayani	7500	991.592.200	3.27.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dilayani	7500	991.592.200	
		Jumlah penerimaan Retribusi Kabupaten/Kota	303.215.000 Ripiah				Jumlah penerimaan Retribusi Kabupaten/Kota	303.215.000 Ripiah		
3.27.04.2.03.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	991.592.200	3.27.04.2.03.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	991.592.200	

RKPD Perubahan Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan Renja Perubahan Tahun 2025					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Perubahan 2025	Pagu Indikatif	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	100 Persen	9.411.700	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	100 Persen	9.411.700	
3.27.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi perizinan	5 rekomendasi	9.411.700	3.27.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi perizinan	5 rekomendasi	9.411.700	
3.27.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	5 Dokumen	9.411.700	3.27.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	5 Dokumen	9.411.700	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	11,76	1.560.888.200	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	11,76	1.560.888.200	
27.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik skor kelompok;	6 Kel	1.560.888.200	27.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik skor kelompok;	6 Kel	1.560.888.200	
27.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	33 unit	110.339.750	27.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	33 unit	110.339.750	
27.07.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8 unit	1.450.548.450	27.07.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8 unit	1.450.548.450	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Forum Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi yang telah dilaksanakan merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Cimahi untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2025.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik RPD 2023-2026, tema dan prioritas pembangunan 2025 serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2025 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kota Cimahi bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan di Kota Cimahi.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.5 (T-C.32) berikut ini:

Tabel. 2.5
T.C. 3.2. Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
				Usulan	Masalah
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	RW 08 Kel. Padasuka	Jumlah produksi ikan konsumsi (Ton)	300	Pembinaan Pertanian, Budidaya Ikan Air Tawar dan ternak hewan	Dibutuhkan pendampingan untuk budidaya ikan lele dan ikan mas
Sub Kegiatan Pemberian pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	RW 10 Kel. Citeureup	Jumlah produksi ikan hias (ekor)	2.380.000		
				Pembinaan Pertanian, Budidaya Ikan Air Tawar dan ternak hewan	Dibutuhkan pendampingan untuk budidaya perikanan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	RW 04 Cibeber, Cimahi Selatan	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas (persen)	10	Pembinaan Pertanian, Budidaya Ikan Air Tawar dan ternak hewan	Kurangnya lapangan pekerjaan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Cipageran RW 19 dan RW 25 Kota Cimahi, Cimahi Utara	-		Pembinaan Pertanian, Budidaya Ikan Air Tawar dan ternak hewan	Pembinaan dan pemodalan untuk pertanian
	Cibodas cempaka rw 09, Kel. Utama Cimahi Selatan			Pembinaan Pertanian, Budidaya Ikan Air Tawar dan ternak hewan	Pemahaman budidaya perikanan dan pertanian kurang optimal

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
				Usulan	Masalah
	Jl Nanjung Cibodas RW 11, Kel. Utama Cimahi Selatan	-		Pembinaan Pertanian, Budidaya Ikan Air Tawar dan ternak hewan	kurangnya wawasan bagi petani dan peternak
	lembur sawah RW 12 dan RW 16, Kel. Utama Cimahi Selatan	-		Pembinaan Pertanian, Budidaya Ikan Air Tawar dan ternak hewan	Kurangnya pembinaan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Baros, Cimahi Tengah	Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana pendukung pertanian (persen)	100	Pembinaan Pertanian, Budidaya Ikan Air Tawar dan ternak hewan	Sulitnya akses pembelian bibit tanaman
Sub Kegiatan Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					

Program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perencanaan program kegiatan diusulkan oleh pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, perangkat daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah, hasil penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota Cimahi, yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan, dikaitkan dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang kemudian diselaraskan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, juga dilakukan penelaahan agar selaras dengan kebijakan nasional.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan sasaran dan prioritas Pembangunan dalam dokumen Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025 didasarkan pada kebutuhan untuk mengakomodasi perubahan kebijakan strategis di Tingkat nasional dan daerah, penyesuaian terhadap kerangka perencanaan jangka menengah yang baru, serta hasil evaluasi capaian Pembangunan hingga Triwulan I Tahun 2025. Selain itu, dinamika kondisi fiskal, social dan ekonomi Kota Cimahi menjadi faktor krusial yang mendorong realokasi belanja serta penyesuaian sasaran Pembangunan tahunan.

Secara normatif, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan Tingkat pencapaian suatu tujuan Pembangunan daerah. Sementara itu prioritas Pembangunan daerah adalah focus strategis penyelenggaraan pemerintahan yang disusun secara selektif dan bertahap untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pembangunan daerah.

Dalam konteks perubahan RKPD Tahun 2025, perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Kota Cimahi mempertimbangkan lima dasar pertimbangan utama yang telah dijabarkan dalam Bab I, yaitu:

1. Penyesuaian terhadap dokumen perencanaan jangka menengah terbaru, mencakup RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029, dan RPJMD Kota Cimahi 2025–2029, yang memuat arah pembangunan baru berdasarkan visi dan misi kepala daerah hasil Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
2. Arahan Pemerintah Pusat melalui SE Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ, yang menggarisbawahi prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penciptaan lapangan kerja;
3. Kebijakan efisiensi belanja daerah sebagaimana tertuang dalam SE Mendagri Nomor 900/833/SJ sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang mengharuskan optimalisasi belanja strategis dan penyesuaian terhadap realisasi pendapatan daerah, terutama TKD;
4. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Cimahi Tahun 2024 hingga Triwulan I Tahun 2025, yang mengindikasikan perlunya penyesuaian terhadap indikator, target sasaran, dan pengalokasian anggaran agar lebih realistis dan responsif terhadap kondisi lapangan;
5. Perubahan proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah, yang mendorong perlunya penguatan efisiensi fiskal dan reorientasi belanja pada program dan kegiatan prioritas.

Berangkat dari lima dasar pertimbangan tersebut, sasaran pembangunan Kota Cimahi Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator-indikator kunci dalam RPJMD, dengan tetap menjaga konsistensi terhadap capaian pelayanan dasar dan penguatan reformasi birokrasi. Sasaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan daerah, yang dipilih berdasarkan tingkat urgensi, manfaat strategis, dan keterkaitannya dengan penyelesaian isu-isu pembangunan.

3.1 Prioritas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi yang Mendukung Prioritas Pemerintah Kota

3.1.1 Visi Kota Cimahi Tahun 2025-2029

“CIMAHI MANTAP”

MELALUI KOLABORASI ANTAR GENERASI YANG MAJU, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN

Visi Kota Cimahi Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

MAJU : Mewujudkan Pembangunan Kota Cimahi yang lebih maju di segala bidang

AGAMIS : Menciptakan kota yang agamis serta menjunjung tinggi nilai religious dan toleran

NYAMAN: Menuwujudkan lingkungan asri dan berkelanjutan dengan fasilitas ruang ekspresi public yang representatif

TELADAN: Menjadikan Cimahi sebagai kota teladan dalam tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas

AMAN: Mewujudkan lingkungan masyarakat yang damai, tertib dan teratur

PRODUKTIF : Meningkatkan daya kretivitas masyarakat yang produksti menuju masyarakat sejahtera

Penjelasan :

Dengan demikian visi “CIMAHI MANTAP” adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan mejadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religious akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik

3.1.2 Misi Kota Cimahi Tahun 2025-2029

Untuk mengaktualisasikan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis, dan Berkarakter
Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta karakter dan spiritualitas masyarakat, yang menjadi fondasi daya saing daerah.
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Produktif
Fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi lokal, UMKM, sektor kreatif, serta penciptaan peluang kerja yang inklusif.
3. Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan
Menedepankan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, partisipatif, serta berbasis inovasi dan digitalisasi pelayanan publik.
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondusifitas Kota yang Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan
Bertujuan untuk menciptakan kota yang layak huni, sehat, dan resilien terhadap perubahan iklim dan bencana.
5. Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kolaborasi Antar Generasi
Misi ini menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan, serta penguatan solidaritas dan ketahanan sosial.

Kelima misi ini selanjutnya akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, serta menjadi acuan utama dalam penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas terhadap program dan kegiatan pembangunan tahunan, sehingga terjaga kesinambungan antara kebijakan jangka menengah dengan pelaksanaan pembangunan tahunan. Dalam konteks penyusunan Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2025, perumusan tujuan dan sasaran tidak lagi merujuk pada RPD Kota Cimahi Tahun 2023–2026, melainkan telah mengacu pada RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025–2029 yang merupakan dokumen perencanaan resmi hasil penetapan kepala daerah terpilih pasca Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2025–2029, yang telah dirumuskan secara sistematis dalam RPJMD, serta dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang terukur. Penyusunan tujuan dan sasaran juga mempertimbangkan arah kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan RKP Tahun 2025, serta diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 untuk memastikan integrasi vertikal perencanaan antar-tingkatan pemerintahan.

Dengan demikian, penyelarasan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2025 dimaksudkan untuk:

1. Menjamin konsistensi antara visi-misi kepala daerah dan pelaksanaan program tahunan,
2. Meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan melalui indikator yang dapat diukur secara periodik,
3. Mengintegrasikan kepentingan pembangunan Kota Cimahi dalam kerangka nasional dan provinsi,

4. Menyusun prioritas yang responsif terhadap kondisi faktual dan hasil evaluasi pembangunan tahun berjalan.

Perubahan pendekatan ini mencerminkan transisi dari kerangka RPD ke arah implementasi penuh RPJMD baru, serta memastikan bahwa RKPD Tahun 2025 tidak hanya berperan sebagai dokumen teknokratis, tetapi juga sebagai instrumen politik dan strategis pembangunan daerah yang terintegrasi.

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional 2024

Dalam rangka mengarahkan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas pembangunan nasional yang menjadi visi dan arah kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Asta Cita tidak hanya merupakan janji politik, tetapi telah dirumuskan secara teknokratis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan dijadikan dasar penyusunan delapan Prioritas Nasional yang menjadi kerangka utama pembangunan nasional lima tahunan.

Asta Cita mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan negara dalam seluruh aspek kehidupan rakyat dengan menekankan pada transformasi struktural, keadilan sosial, dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Agenda ini mencakup bidang ideologi, ekonomi, sosial, hukum, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan.

Adapun kedelapan Asta Cita yang menjadi landasan arah pembangunan nasional adalah:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,

energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, Asta Cita tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi secara menyeluruh dengan sasaran pembangunan nasional yang terukur dan berbasis hasil (*outcome-based development*). Sasaran pembangunan nasional Tahun 2025–2029 disusun sebagai representasi keberhasilan pembangunan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan transformasi menuju *Indonesia Maju* dan mendekati status negara berpendapatan tinggi pada

tahun 2045. Sasaran ini terstruktur dalam beberapa dimensi strategis yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan pengaruh global. Secara garis besar, sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 mencakup hal-hal berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan per Kapita Menuju Setara Negara Maju
Sasaran ini mencerminkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Target utama meliputi:
 - 1) Pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dari 5,05% pada tahun 2024 menjadi 5,3% pada 2025, dan diproyeksikan mencapai 8% pada tahun 2029;
 - 2) Kenaikan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita dari USD 4.870 (2023) menjadi USD 5.410 (2025), hingga mencapai USD 8.000 (2029);
 - 3) Peningkatan kontribusi sektor-sektor strategis, yaitu PDB Maritim dari 7,9% (2022) menjadi 8,1% (2025) dan 9,1% (2029), serta PDB Manufaktur dari 18,67% (2023) menjadi 21,9% pada 2029.
2. Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia di Dunia Internasional Meningkat
Indonesia menargetkan peningkatan posisi dalam kancah global melalui penguatan diplomasi dan kapasitas nasional. Hal ini tercermin dari peningkatan peringkat Global Power Index, dari posisi 34 (2023) menjadi 33 (2025), dan 29 (2029), yang mencerminkan pengakuan atas peran strategis Indonesia dalam geopolitik internasional.
3. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang
Penurunan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan. Targetnya adalah:

- 1) Menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,03% (Maret 2024) menjadi 7–8% (2025), dan 4,5–5,0% (2029);
 - 2) Penghapusan kemiskinan ekstrem hingga kurang dari 0,5% pada 2026;
 - 3) Penurunan rasio gini dari 0,379 (Maret 2024) menjadi 0,378–0,382 (2025) dan 0,372–0,375 (2029);
 - 4) Peningkatan kontribusi sektor KTI (Knowledge and Technology Intensive) dalam PDRB dari 20,9% (2023) menjadi 22,4% (2029).
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
- Peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Target yang ditetapkan adalah peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) dari 0,54 (2020) menjadi 0,56 (2025), dan 0,59 (2029), yang mencerminkan peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta produktivitas tenaga kerja.
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission
- Pembangunan rendah karbon dan pelestarian lingkungan menjadi pilar penting. Sasaran utama adalah:
- 1) Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 34,09% (2022) menjadi 35,53% (2025) dan 45,17% (2029);
 - 2) Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 72,54 (2023) menjadi 76,49 (2025) dan 77,20 (2029).

Sasaran-sasaran tersebut menjadi pedoman utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi antara kebijakan nasional dan daerah. Sasaran ini juga menjadi dasar pengukuran keberhasilan pembangunan lintas sektor secara berkelanjutan.

Kedelapan Asta Cita memberikan arah normatif dan ideologis, sementara sasaran pembangunan nasional yang menyertainya

memberikan ukuran teknokratis yang wajib dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah dalam menyusun Perubahan RKPD.

Berikut adalah tabel keselarasan antara Asta Cita dengan Misi Kota Cimahi Tahun 2025-2029:

Tabel 3.1 Keselarasan antara Asta Cita dengan

Misi Kota Cimahi Tahun 2025-2029

Asta Cita (Prioritas Nasional)	Uraian Prioritas	Misi Kota Cimahi	Kesesuaian Substansi
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM	Penguatan demokrasi, toleransi, dan kehidupan berbangsa	Misi 5: Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antar generasi	Membangun masyarakat inklusif, harmonis, dan partisipatif
2. Memantapkan pertahanan keamanan dan mendorong kemandirian bangsa	Ketahanan pangan, energi, ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru	Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang produktif	Penguatan ekonomi lokal dan kemandirian daerah berbasis potensi unggulan
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Konektivitas wilayah, wirausaha, industri kreatif dan digital	Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang produktif Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota yang aman,	Mendukung infrastruktur produktif dan lapangan kerja inovatif

Asta Cita (Prioritas Nasional)	Uraian Prioritas	Misi Kota Cimahi	Kesesuaian Substansi
		nyaman dan berkelanjutan	
4. Memperkuat pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing	Pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, kepemudaan	Misi 1: Mewujudkan Kota Cimahi yang maju dengan sumber daya manusia yang unggul, agamis dan berkarakter	Penekanan pada kualitas manusia dan pembentukan karakter warga
5. Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri SDA	Hilirisasi tambang, pertanian, kelautan, dan industri strategis	Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang produktif	Mendorong nilai tambah ekonomi dan daya saing lokal
6. Membangun dari desa dan dari bawah	Penguatan desa, pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi	Misi 5: Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antar generasi	Pendekatan berbasis komunitas dan keadilan sosial
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi	Reformasi kelembagaan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi	Misi 3: Menjadikan Cimahi sebagai kota teladan dalam tata kelola pemerintahan	Reformasi birokrasi, pelayanan digital, dan transparansi
8. Memperkuat harmoni sosial, lingkungan,	Perubahan iklim, pelestarian budaya, dan keberlanjutan	Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan	Penataan lingkungan dan budaya lokal

Asta Cita (Prioritas Nasional)	Uraian Prioritas	Misi Kota Cimahi	Kesesuaian Substansi
budaya, dan toleransi		hidup dan kondusifitas kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan	yang adaptif dan ramah iklim

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Cimahi, 2025

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan arah pembangunan jangka menengah 2025–2029 melalui visi “Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata.” Visi ini mencerminkan tekad untuk memperkuat peran wilayah perdesaan (lembur) dan perkotaan (kota) secara berimbang, melalui pendekatan pembangunan yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis pada keunggulan lokal.

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dituangkan secara sistematis dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029. Penelaahan terhadap dokumen tersebut menjadi penting bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam menyelaraskan prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahun 2025, terutama dalam konteks kawasan strategis Bandung Raya.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tujuan	Sasaran
Tujuan 1 Terwujudnya SDM yang <i>Cageur, Bageur, Bener, Pinter</i> dan <i>Singer</i>	– Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; – Terbentuknya individu beretika dan berbudaya;

Tujuan	Sasaran
	– Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum; – Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan; – Terbentuknya individu kreatif dan inovatif.
Tujuan 2.1 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Tinggi berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi	– Meningkatnya produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri; – Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk Swasembada Pangan; – Meningkatkan Sektor Perdagangan melalui Optimalisasi Disttibusi Barang dan Jasa; – Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Insutri Kreatif.
Tujuan 2.2 Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha	– Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja; – Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja; – Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan.
Tujuan 3 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang Berbasis Lingkungan	– Meningkatnya Layanan Infrastruktur Kewilayahan, Infrastruktur Dasar di Pedesaan dan Kawasan Konservasi, serta Penataan Perkotaan yang Berbasis Lingkungan; – Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil; – Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat.

Tujuan	Sasaran
Tujuan 4.1 Terciptanya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi	– Meningkatnya Penerapan Iptek, Riset dan Inovasi dalam pembangunan; – Meningkatnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan.
Tujuan 4.2 Terwujudnya Birokrasi Gesit dan Berorientasi Pelayanan	– Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif

Sumber: Dokumen Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat

3.3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2025

Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Adapun Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Cimahi Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.X Tujuan dan Sasaran Kota Cimahi Tahun 2025

Misi Teknokratis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025
Mewujudkan Kota Cimahi yang Maju dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis dan Berkarakter	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia		IPM	80,64
		Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,79
		Meningkatnya aksesibilitas dan	Harapan Lama Sekolah	13,92

Misi Teknokratis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025
		pemerataan kualitas pendidikan		
Meningkatkan pembangunan ekonomi yang Produktif	Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi		PDRB Per kapita	79,68-80,65
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	LPE	5,72-6,22
		Menurunnya tingkat pengangguran	TPT	8,69-9,49
Menjadikan Cimahi sebagai Kota Teladan dalam Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	86
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	86,79
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kondusifitas kota		Indeks Perkotaan Berkelanjutan	70,1
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	50.60
		Meningkatnya stabilitas wilayah	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	50,01
Meningkatkan perlindungan dan			Indeks GINI	0,369-0,392

Misi Teknokratis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025
pemberdayaan masyarakat melalui Kolaborasi Antar Generasi	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	0,58
			Tingkat Kemiskinan	3,79-4,12

Sumber : Dokumen Rancangan RPJMD Kota Cimahi

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tabel 3.1
Tujuan Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran
Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025

NO	VISI	MISI		RANCANGAN MISI TEKNOKRATIS	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	TARGET MURNI	TARGET PERUBAHAN
1.	CIMAHI CERDAS	Misi 3	Meningkatkan Perekonomian yang berdaya saing serta berbasis inovasi daerah		Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi Sasaran : Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Nilai PPH Ketersediaan (Nilai)	2380	2183
						Skor PPH Ketersediaan (Skor/ Nilai)	68	90,05
	CIMAHI MANTAP	Misi 3	Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas	MEWUJUDKAN KOTA CIMAHI YANG MAJU DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL, AGAMIS DAN BERKARAKTER	Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Skor PPH Ketersediaan (Skor/ Nilai)		
		Misi 7	Penguasaan IPTEK dan					
		Misi 8	Olahraga dan Kesehatan					
2.	CIMAHI CERDAS	Misi 3	Meningkatkan Perekonomian yang berdaya saing serta berbasis inovasi daerah			Persentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian (persen)	1,32	1,55

NO	VISI	MISI		RANCANGAN MISI TEKNOKRATIS	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	TARGET MURNI	TARGET PERUBAHAN
	CIMAHI MANTAP	Misi 2	Pemberdayaan Ekonomi dan UMKM	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG PRODUKTIF	Tujuan : Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian (persen)		
		Misi 6	Pariwisata Kota (Urban Tourism) Budaya dan Kuliner		Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi			
		Misi 13	Ekonomi Pesantren					
		Misi 4	Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan					
3.	CIMAHI CERDAS	Misi 4	Mewujudkan keserasian pembangunan yang berkeadilan		Tujuan : Menurunnya angka kemiskinan	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan (persen)	100	100
	CIMAHI MANTAP				Sasaran : Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah			
		Misi 9	Konektivitas dan Kerjasama	MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KOLABORASI ANTAR GENERASI	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat			
		Misi 10	Kolaborasi dan Partisipasi Publik		Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan sosial			
		Misi 11	Pembangunan Keberpihakan Terhadap Perempuan					
		Misi 12	Pemajuan Kebudayaan Nasional					

NO	VISI	MISI		RANCANGAN MISI TEKNOKRATIS	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	TARGET MURNI	TARGET PERUBAHAN
		Misi 4	Infrastuktur dan Lingkungan Berkelanjutan					
4.	CIMAHI CERDAS	Misi 2	Misi 2 Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik		Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan Sasaran : Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian (nilai)	45	77,04
	CIMAHI MANTAP	Misi 1	Pemerintahan yang bersih dan transparan	MENJADIKAN CIMAHI SEBAGAI KOTA TELADAN DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian (nilai)		

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.1.1 Faktor-Faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Perubahan

1. Adanya Surat Keputusan Bapanas No.3 Tahun 2025 tentang batas minimum penyediaan beras CPPD Tahun 2025 untuk Kota Cimahi sebesar 64,43 Ton, sementara kondisi eksisting CPPD Kota Cimahi Tahun 2024 50,26 Ton, sehingga direncanakan akan ada penambahan pengadaan CPPD pada Anggaran Perubahan.
2. Untuk mendukung keamanan pangan segar di Kota Cimahi diperlukan alat uji yang lebih modern yang digunakan dalam pengujian residu pestisida
3. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian No.39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten Kota dan Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 26159/Pk.430/F/03/2025 Hal pembentukan Kader pemantauan dan Tindakan Cepat Kejadian Zoonosis (Kader Zoonosis) tanggal 26 maret 2025, mengajukan penambahan untuk pelaksanaan bimbingan teknis kader zoonosis sebesar Rp.20.000.000
4. Adanya inpres 1 2025 tentang efisiensi anggaran, sehingga Dinas Pangan dan Pertanian mendapatkan pengalihan anggran hasil efisiensi tersebut yang digunakan untuk peningkatan pelayanan kesmavet di Kota Cimahi, UPTD Puskesmas mendapatkan Kajian DED dan Sarana Prasana, dan UPTD BBIAT mendapatka Kajian FS, Probis BLUD dan DED. Adanya Program prioritas Walikota untuk peningkatan PAD , kedua UPTD tersebut sebagai penghasil PAD dari sektor Dinas Pangan dan Pertanian , maka diperlukan peningkatan sarana prasarana.

3.1.2 Uraian Garis Besar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Renja Perubahan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp.481.043.000 (2,64%) Semula dari Rp.17.771.448.854,00 menjadi Rp.18.252.491.854.

Pada Triwulan I Anggaran mengalami efisiensi untuk perjalanan dinas tetapi ada penambahan anggaran pada UPTD BBIAT sebesar

Rp.100.000.000 untuk Kajian dan penambahan pada UPTD Puskesmas sebesar Rp.170.000.000 untuk Alat Medis dan ada penambahan untuk tenaga harian lepas sebanyak 2 bulan , penambahan tersebut pada Parsial 1 sedangkan pada perubahan Kenaikan anggaran berasal dari adanya tambahan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 12 Ton dengan anggaran sebesar Rp.180.000.000, tambahan untuk pembelian alat keamanan pangan uji pestisida modern sebesar Rp.100.000.000 dan tambahan untuk kekurangan Bimbingan Teknis kader Kesmavet sebesar Rp.20.000.000. Selain itu terdapat beberapa pergeseran pada beberapa Sub Kegiatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
TAHUN 2025

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025 yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun untuk mendukung sasaran strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dan juga untuk mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Kota Cimahi demi mengoptimalkan pelayanan perangkat daerah kepada masyarakat terkait urusan bidang pangan, pertanian dan kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2025 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi akan melaksanakan 10 (sepuluh) program, 25 (dua puluh lima) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan. Program-program tersebut secara menggambarkan 5 (lima) kelompok kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Kegiatan yang terkait koordinasi dan pelaksanaan kegiatan urusan pangan, yaitu : peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan masyarakat;
2. Kegiatan yang terkait koordinasi dan pelaksanaan kegiatan urusan pertanian, yaitu : penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, perizinan usaha pertanian dan penyuluhan pertanian;
3. Kegiatan yang terkait koordinasi dan pelaksanaan kegiatan urusan kelautan dan perikanan, yaitu : pengelolaan perikanan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
4. Kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah;
5. Kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang terkait dengan administrasi kepegawaian, administrasi umum, administrasi

keuangan, penyediaan jasa pelayanan umum dan pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025 pada umumnya sebagian besar dilaksanakan di seluruh wilayah kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan di Kota Cimahi.

Sumber pendanaan untuk seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 18. 252.491.854 (*Delapan belas milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*) yang bersumber dari dana APBD Kota Cimahi.

Tabel 4.1
Pagu Efisiensi Belanja pada
Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2025
(dalam Rupiah)

No	Nama OPD	Efisiensi Perjalanan Dinas	Efisiensi Lainnya	Total Efisiensi
1	Dinas Pangan dan Pertanian	208.317.000	37.800.000	246.117.000

Hasil dari upaya efisiensi belanja yang telah dilakukan secara komprehensif, termasuk pemotongan pada kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar/FGD, perjalanan dinas, dan honorarium, tidak hanya bertujuan untuk penghematan semata. Lebih dari itu, pagu efisiensi yang berhasil dihimpun tersebut secara strategis dialokasikan kembali sebagai penambahan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang program dan kegiatannya secara langsung mendukung pencapaian prioritas nasional serta prioritas pembangunan daerah. Berikut adalah Penambahan Pagu dari re-alokasi Anggaran yang dilakukan:

Tabel 4.2
Pagu Efisiensi Belanja pada
Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2025
(dalam Rupiah)

No	Nama OPD	Pagu Penambahan
1	Dinas Pangan dan Pertanian	469.550.000

Tabel 4.3
Daftar Tindak Lanjut
Dukungan Pemerintah Daerah atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun
2025

ASTACITA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	
		SEBELUM	SESUDAH
02. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru			
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	1.878.838.400	1.883.142.200
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	1.878.838.400	1.883.142.200
2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.868.871.000	1.868.870.800
2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	9.967.400	14.271.400

Tabel 4.4
DAK NON FISIK

No	Nama OPD	Kegiatan	Pagu
1	Dinas Pangan dan Pertanian	BOP Penyuluh	34.000.000

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
MATRIK SANDING PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA CIMAHI
TAHUN 2025

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dinas Pangan dan Pertanian			17.771.448.854	Dinas Pangan dan Pertanian				481.043.000		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.019.447.854	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				264.251.850		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			14.019.447.854	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				264.251.850		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
1	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat daerah	48 Nilai 81 Nilai BB Nilai	10.920.110.224	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat daerah	80 Nilai 82 Nilai 77,94 (BB) Nilai	10.954.599.274	34.489.050		DINAS PANGAN PERTANIAN
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (RPJMD 2025-2029)	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat daerah					
	2.09.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan	Terfasilitasinya dokumen koordinasi dan kegiatan	100 Persen	589.760.700	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan	Terfasilitasinya dokumen koordinasi dan	100 Persen	600.584.500	10.823.800		DINAS PANGAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					
	2.09.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	55.888.050	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	83.299.850	27.411.800	Terdapat tambahan output : 1 Dokumen	DINAS PANGAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RPJMD 2025-2029)						
	2.09.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	24.397.850	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	29.017.850	4.620.000		DINAS PANGAN PERTANIAN
						Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					DINAS PANGAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.09.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	509.474.800	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	486.266.800	-21.208.000		DINAS PANGAN PERTANIAN
						Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
						Sub Keg. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor al Daerah (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Data Statistik Sektor al Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji ASN dan P3K (kali) Tersedianya Tunjangan ASN dan P3K (kali)	14 kali 12 kali	8.720.819.624	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji ASN dan P3K (kali) Tersedianya Tunjangan ASN dan P3K (kali)	14 kali 12 kali	8.720.819.624		Diperlukan penyesuaian di tahapan penganggaran APBD. Target disesuaikan dengan adanya gaji 13,14 dan tunjangan 13,14	DINAS PANGAN PERTANIAN
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RPJMD 2025-2029)	Persentase terfasilitasinya gaji ASN dan P3K Dispangtan					DINAS PANGAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan	8.720.819.624	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan	8.720.820.024			DINAS PANGAN PERTANIAN
						Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					DINAS PANGAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.09.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian untuk pengembangan kompetensi	80 orang	104.368.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian untuk pengembangan kompetensi	79 orang	72.568.000	-31.800.000		DINAS PANGAN PERTANIAN
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (RPJMD 2025-2029)	Persentase terfasilitasinya administrasi kepegawaian perangkat daerah					DINAS PANGAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 paket	31.800.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0		Kebijakan TAPD untuk didrop belanja Paket pakaian dinas	DINAS PANGAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	55 orang	72.568.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	55 orang	72.568.000			DINAS PANGAN PERTANIAN
						Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan					
	2.09.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan dukungan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	613.528.150	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan dukungan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	672.700.750	59.172.600		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (RPJMD 2025-2029)	Persentase terfasilitasinya penunjang administrasi umum perangkat daerah					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.890.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.340.000	7.450.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	269.089.400	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	336.263.400	67.174.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	37.424.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	41.624.000	4.200.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.09.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.198.750	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19.335.350	4.136.600		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	12.474.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	8.400.000	-4.074.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	213.540.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	210.270.000	-3.270.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berkas Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berkas Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	55.912.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berkas Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	39.468.000	-16.444.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dukungan Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	417.360.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dukungan Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	429.720.000	12.360.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Penunjang Urusan Pemerintah				Penunjang Urusan Pemerintah					
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RPJMD 2025-2029)	Persentase terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	167.400.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	167.400.000	0		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Pengadaan Aset Tak Berwujud (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	249.960.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	262.320.000	12.360.000	Terdapat pengalihan aktivitas pekerjaan dari Puskesmas	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	286.389.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	276.951.000	-9.438.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RPJMD 2025-2029)	Persentase terfasilitasinya penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RPJMD 2025- 2029)					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000	0		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.337.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.337.000	0		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							dan Listrik yang Disediakan					
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	193.852.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	184.414.000	-9.438.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	187.884.750	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	181.255.000	-6.629.750		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RPJMD 2025-2029)	Persentase terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.09.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	171.854.750	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	157.745.000	-14.109.750	Penambahan target untuk kendaraan roda 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	16.030.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	23.510.000	7.480.000	Penambahan anggaran untuk pembelian AC di BBIAT karena sudah banyak yang rusak	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (RPJMD 2025-2029)	Persentase terfasilitasinya Peningkatan Pelayanan BLUD				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RPJMD 2025-2029)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN (RPJMD 2025-2029)	Persentase Jumlah Cadangan Pangan				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (RPJMD 2025-2029)	Jumlah total cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan /kebutuhan pangan dalam daerah (To				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (RPJMD 2025-2029)	Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (laporan)				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein di Kota Cimahi Rata-rata ketersediaan Energi	2100 & 57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari 2380 & 68 kkal/kap/hari &	1.034.562.830	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein di Kota Cimahi Rata-rata ketersediaan Energi	1995 & 57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari 2183&68,2 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	1.200.749.830	166.187.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				gr/kap/hari								
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (RPJMD 2025-2029)	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)					
	2.09.03.2.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coefficient Varian) Bahan Pahan Pokok	12 Dokumen	293.144.350	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coefficient Varian) Bahan Pahan Pokok	12 Dokumen	270.863.350	-22.281.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coefficient Varian) Bahan Pahan Pokok (dokumen)					
	2.09.03.2.01.0010	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	24 unit	189.803.800	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	24 unit	179.523.800	-10.280.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (RPJMD 2025-2029)	Jumlah laporan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.09.03.2.01.0012	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	8.898.000	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	38.042.000	29.144.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0015	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	94.442.550	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	53.297.550	-41.145.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Pemantauan Stok Pangan <i>(RPJMD 2025-2029)</i>	Jumlah dokumen Informasi Stok Pangan				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) <i>(RPJMD 2025-2029)</i>	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota <i>(RPJMD 2025-2029)</i>	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (dokumen)				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	prosentase jumlah cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan /kebutuhan pangan dalam daerah	25,53 Persen	270.977.980	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	prosentase jumlah cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan /kebutuhan pangan dalam daerah	100 persen	447.557.980	176.580.000	disesuiakan dengan persentase capaian target jumlah CPPD di Kota Cimahi sesuai dengan standar Bapanas	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.09.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14 Ton	270.977.980	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14 Ton	447.557.980	176.580.000	CPPD Kota Cimahi sudah tersedia di Murni 13,3 ton + 12 Ton (Penyesuaian dengan Target Jumlah CPPD untuk Kota Cimahi dari Bapanas sebesar 64,43 Ton (perubahan) tambahan anggaran pembelian CPPD 180.000.000 dari pengalihan efisiensi	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPH Konsumsi	84 Skor	470.440.500	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPH Konsumsi	90,14 skor	482.328.500	11.888.000	Penyesuaian Hasil Rakor Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai	Persentase pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						dengan Angka Kecukupan Gizi (RPJMD 2025-2029)						
	2.09.03.2.04.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	177.054.000	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 Dokumen	177.054.000	0		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (RPJMD 2025-2029)					Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	293.386.500	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	305.247.500	11.888.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100 persen	1.936.763.700	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100 persen	1.902.299.500	-34.464.200		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN (RPJMD 2025-2029)	Persentase intervensi Daerah Rentan Rawan Pangan					
	2.09.04.2.01	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan wilayah	3 Kecamatan	20.177.300	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan wilayah	3 Kecamatan	19.157.300	-1.020.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.09.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	20.177.300	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	19.157.300	-1.020.000	efisiensi	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (RPJMD 2025-2029)	Tersedianya dokumen Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kot					
	2.09.04.2.02	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100 Persen	1.916.586.400	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100 Persen	1.883.142.200	-33.444.200		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota (RPJMD 2025-2029)	Cakupan wilayah penanganan kerawanan pangan					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	70 persen	128.011.100	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	95 Persen	226.051.100	98.040.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (RPJMD 2025-2029)	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumah pengawasan keamanan pangan ke retail/pasar	12 kali	128.011.100	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumah pengawasan keamanan pangan ke retail/pasar	12 kali	226.051.100	98.040.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28.743.600	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28.743.600			

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (RPJMD 2025-2029)	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	12 Dokumen	99.267.500	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	12 Dokumen	197.307.500	98.040.000	Penambahan Rp. 97 juta untuk pembelian alat uji pestisida modern	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
5	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi ikan hias Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	2380000 ekor 300 ton		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi ikan hias Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	2480000 ekor 291 ton	776.540.900	86.450.000	Penyesuaian dengan hasil monev dan validasi	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (RPJMD 2025-2029)	Persentase rekomendasi ijin usaha bidang Pembudidaya ikan yang dilayani				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							dan/atau Tenaga Kerja Asing					
	3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya ikan yang diberdayakan	1 kelompok	245.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya ikan yang diberdayakan	16 Kelompok	245.000.000	0	Penyesuaian dengan kelompok yang dibimbing yang terdiri dari kelompok ikan konsumsi dan ikan hias	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.02.0004	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4 Kelompok	245.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4 Kelompok	245.000.000	0		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						(RPJMD 2025-2029)	Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					
	3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih ikan hias yang dihasilkan Jumlah benih ikan konsumsi yang dihasilkan Jumlah penerimaan retribusi	108.000 ekor 8250 ekor 50.000.000 rupiah	445.090.900	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih ikan hias yang dihasilkan Jumlah benih ikan konsumsi yang dihasilkan Jumlah penerimaan retribusi	108.000 ekor 8250 ekor 54.000.000 rupiah	531.540.900	86.450.000	Penyesuaian dengan jumlah target PAD tahun 2025	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.999.750	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.999.750	0		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	3.25.04.2.04.0009	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	1 unit	440.091.150	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	1 unit	526.541.150	86.450.000	Masih kekurangan untuk belanja jasa tenaga harian lepas (3 orang) yang belum diangkat menjadi P3K	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											sebesar Rp 19.102.000	
						Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi				Penyesuaian dengan Inmen No 2 (Rakortek)	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha pembudidaya ikan yang diperiksa kepatuhannya				Penyesuaian dengan Inmen No 2 (Rakortek)	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai				Penyesuaian dengan Inmen No 2 (Rakortek)	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							kewenangan kabupaten/kota					
						Sub Kegiatan Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				Penyesuaian dengan Inmen No 2 (Rakortek)	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
6	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANA	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil	3 Persen	215.303.200	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil	2 Persen	215.303.200	0	Penyesuaian dengan hasil monev dan validasi data UPI ada pengurangan	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (RPJMD 2025-2029)	Angka Konsumsi ikan				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasar produk hasil perikanan skla mikro dan kecil	10 UPI	215.303.200	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasar produk hasil perikanan skla mikro dan kecil	10 UPI	215.303.200	0	Disesuaikan dengan target pendamping an penerbitan ijin usaha sebanyak 10 UPI	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.25.06.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 UNIT USAHA	215.303.200	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 UNIT USAHA	215.303.200			DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (RPJMD 2025-2029)	Persentase pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Keg Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			2.846.606.900				2.976.948.050	130.341.150		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	30 persen	49.999.750	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	30 Persen	16.399.750	-33.600.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kawasan	1 Kawasan	49.999.750	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kawasan	1 Kawasan	16.399.750	-33.600.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B yang dikelola	1 Dokumen	49.999.750	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B yang dikelola	1 Dokumen	16.399.750	-33.600.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (RPJMD 2025-2029)	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
							Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan					

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Pelatihan pelaku usaha Tanaman Holtikultura				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
							Jumlah Pelatihan pelaku usaha Tanaman pangan					
							Jumlah kegiatan promosi pelaku usaha tanaman pangan					
						Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (RPJMD 2025-2029)	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura (RPJMD 2025-2029)	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (RPJMD 2025-2029)	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (RPJMD 2025-2029)	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (meter)				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
							Jumlah Promosi Pernakan					
						Sub Keg. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Pernakan (RPJMD 2025-2029)	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (laporan)					
8	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100 persen	1.173.548.400	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100 persen	1.390.248.400	216.700.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (RPJMD 2025-2029)	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)					
	3.27.04.2.01	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang divaksinasi (Rabies/flu burung)	4240 / 600 Dosis	300.124.200	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang divaksinasi (Rabies/flu burung)	4240/ 600 Dosis	345.444.200	45.320.000	Hasil koordinasi dengan pusat untuk vaksinasi Rabies ke ruminansia belum di prioritaskan	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Hewan yang divaksinasi (Rabies/ Flu burung)					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis (RPJMD 2025-2029)	Jumlah kader zoonosis				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1	4 Laporan	300.124.200	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1	4 Laporan	345.444.200	45.320.000	Penambahan kekurangan bimtek kader kesmavet, dari TAPD 20 Juta, dan ditambah dari	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(satu) Daerah Kabupaten/kota				(satu) Daerah Kabupaten/kota				pergeseran subkegiatan pertanian penambahan menjadi 45.000.000	
						Sub Keg. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (RPJMD 2025-2029)	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan kurban yang diperiksa Jumlah pengujian pangan asal hewan	3000 ekor 50 sample	53.212.000	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan kurban yang diperiksa Jumlah pengujian pangan asal hewan	3000 ekor 28 sample	53.212.000	0	Penyesuaian target dengan jumlah dengan hasil monev TW I	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0006	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	4 Laporan	53.212.000	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	4 Laporan	53.212.000	0		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dilayani Jumlah penerimaan Retribusi Kabupaten/Kota	303215000 Rupiah 7500 ekor	820.212.000	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dilayani Jumlah penerimaan Retribusi Kabupaten/Kota	303215000 Rupiah 7500 ekor	991.592.200	171.380.000	Tambahan untuk alat kesehatan	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (RPJMD 2025-2029)	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	820.212.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	991.595.200	171.380.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Keg. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (laporan)					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Keg. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (RPJMD 2025-2029)	Jumlah hewan qurban yang diperiksa				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
							Jumlah produk hewan yang diperiksa					

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesmavet					
						Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (RPJMD 2025-2029)	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (laporan				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan (RPJMD 2025-2029)	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan				Penyesuaian dengan Inmen No 2	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
9	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	100 persen	9.411.700	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	100 persen	9.411.700	0		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN (RPJMD 2025-2029)	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi perizinan	5 Rekomendasi	9.411.700	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi perizinan	5 Rekomendasi	9.411.700	0		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (RPJMD 2025-2029)	Jumlah rekomendasi kelayakan Usaha Pertanian					DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	5 Dokumen	9.411.700	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	5 Dokumen	9.411.700			DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
						Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (RPJMD 2025-2029)	Jumlah laporan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian					
10	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	6 persen	1.613.647.050	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	11,76 persen	1.560.888.200	-52.758.850		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik skor kelompok;	6 kelompok	1.613.647.050	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik skor kelompok;	6 kelompok	1.560.888.200	-52.758.850		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	33 unit	101.999.750	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	33 unit	110.339.750	8.340.000		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				Selisih (Bertambah / Berkurang)	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.27.07.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 unit	1.511.647.300	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8 unit	1.450.548.450	-61.098.850		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

TABEL 4.5
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI
TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Selisih (Bertambah/ Berkurang)	Catatan Penting	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	Renja Murni 2025	Renja Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasi onal	Daer ah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Dinas Pangan dan Pertanian							18.779.417.400	17.771.448.854	18.252.491.854					481.043.000	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.728.105.320	14.019.447.854	14.283.699.704					481.043.000	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							14.728.105.320	14.019.447.854	14.283.699.704					264.251.850	
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	65	68,45	80	48	80 Nilai	10.969.584.404	10.920.110.224	10.954.599.274					34.489.050	
			Nilai IKM Perangkat Daerah	81	81,07	82,04	81	82,1 Nilai									
			Nilai SAKIP Perangkat daerah	BB	BB	BB	BB	BB (77,94)									
	2.09.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Pengkangan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya koordinasi dan dokumen pengkangan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	158.175.800	589.760.700	589.760.700					10.823.800	
	2.09.01.2.01.00 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	12	12	12	13	86.439.550	55.888.050	83.299.850	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			27.411.800	Terdapat tambahan 1 Dokumen
	2.09.01.2.01.00 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	4	4	24.397.850	24.397.850	29.017.850	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			4.620.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Selisih (Bertambah/ Berkurang)	Catatan Penting
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	Renja Murni 2025	Renja Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasi onal	Daer ah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.09.01.2.01.00 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	4	47.338.400	509.474.800	488.266.800	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			-21.208.000	
	2.09.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Gaji ASN	14	14	14	14	14	8.631.579.525,	8.720.819.624	8.720.819.624						
			Jumlah Bulan Tunjangan ASN	12	12	14	12	14									
	2.09.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52	52	8.631.579.525,	8.720.819.624	8.720.819.624	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitung an Anggaran Tahun Sebelumn ya Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaa n atas Kebijakan Penggajia n Pegawai Pemerinta h dengan Perjanjian Kerja			400	
	2.09.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya administrasi	100	100	100	80	80	93.904.000	104.368.000	104.368.000						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Selisih (Bertambah/ Berkurang)	Catatan Penting	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	Renja Murni 2025	Renja Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			kepegawaian perangkat daerah														
	2.09.01.2.05.00 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	53 Paket	0	31.800.000	31.800.000	0	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)				Kebijakan TAPD untuk didrop belanja Paket pakaian dinas
	2.09.01.2.05.00 11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	1	1	1	55 orang	55 orang	62.104.000	72.568.000	72.568.000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			-31.800.000	
	2.09.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terfasilitasinya penunjang administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	12	12	547.515.000	613.528.150	672.700.750					59.172.600	
	2.09.01.2.06.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	2	2	2	6.561.000	9.890.000	17.340.000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			7.450.000	
	2.09.01.2.06.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	2	2	2	208.846.000	269.089.400	336.263.400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			67.174.000	
	2.09.01.2.06.00 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik kantor yang disediakan	12	12	2	2	2	32.500.000	37.424.000	41.624.000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			4.200.000	
	2.09.01.2.06.00 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	12	2	2	2	15.200.000	15.198.750	19.335.350	Kota Cimahi, Semua Kecamatan	Dana Bagi Hasil (DBH)			4.136.600	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Selisih (Bertambah/ Berkurang)	Catatan Penting
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	Renja Murni 2025	Renja Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasi onal	Daer ah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												n, Semua Kel/Desa					
	2.09.01.2.06.00 08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12	12	12	2	1	25.000.000	12.474.000	8.400.000	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			-4.074.000	
	2.09.01.2.06.00 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	12	2	2	244.908.000	213.540.000	210.270.000	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			-3.270.000	
	2.09.01.2.06.00 11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Peerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	12	2	2	14.500.000	55.912.000	39.468.000	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			-16.444.000	
	2.09.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah dukungan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100	100	0	12	12	935.479.281	417.360.000	429.720.000					12.360.000	
	2.09.01.2.07.00 01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	1	1	616.154.000	167.400.000	167.400.000	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			0	
	2.09.01.2.07.00 11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	0	3	4	319.325.281	249.960.000,	262.320.000,	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			12.360.000	
	2.09.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	0	12	12	401.728.618	286.389.000	276.951.000					-9.438.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Selisih (Bertambah/ Berkurang)	Catatan Penting	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	Renja Murni 2025	Renja Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasi onal	Daer ah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.09.01.2.08.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	12	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			0	
	2.09.01.2.08.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik yang disediakan	12	12	12	12	12	79.287.629	91.337.000	91.337.000	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			0	
	2.09.01.2.08.00 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12	12	12	12	12	321.240.989	193.852.000	184.414.000	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			-9.438.000	
	2.09.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemeliharaan daerah	100	100	100	100	100	201.202.180	187.884.750	187.884.750					-6.629.750	
	2.09.01.2.09.00 02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasionalatau lapangan yang dipelihara daan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	4	4	5	8	191.702.180	171.854.750	157.745.000	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			-14.109.750	
	2.09.01.2.09.00 10	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabil itasi	10	2	2	2	7	9.500.000	16.030.000	23.510.000	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			7.480.000	
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rata-rata ketersediaan Energi (kkal/Kap/hari) dan Protein	E = 2.380 P = 68	E =2.183 P = 68,2	E =2.186 P =75,7	E =2.380 P =68	E =2.183 P =68,2	992.185.066	1.034.562.830	1.200.749.830					166.187.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Selisih (Bertambah/ Berkurang)	Catatan Penting	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	Renja Murni 2025	Renja Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasi onal	Daer ah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			(gr/kap/hari) di Kota Cimahi														
			Rata-rata konsumsi Energi (kkal/Kap/hari) dan Protein (gr/kap/hari) di Kota Cimahi	E = 2.100 P = 63	E = 1993,4 P = 61,3	E = 1.994 P = 60,7	E = 2100 P = 57	E = 1.964 P = 57									
	2.09.03.2.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coeficent Varian) Bahan Pangan Pokok	12	12	12	12	12	309.898.548	293.144.350	270.863.350					-22.281.000	
	2.09.03.2.01.00 1	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3	19	24	24	24	209.975.748	189.803.800	179.523.800	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			-10.280.000	
		Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12	12	12	12	12	54.749.400	94.442.550	53.297.550	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			-41.145.000	
	2.09.03.2.01.00 12	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Neraca Bahan Makanan (Dok NBM)	1	1	1	1	1	45.173.400	8.898.000	38.042.000	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			29.144.000	
	2.09.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan/kebu tuhan pangan daerah)	25,53	65,31	96,65	25,53	100	209.822.500	270.977.980	270.977.980						disesuaikan dengan persentase capaian target jumlah CPPD di Kota Cimahi sesuai dengan standar Bapanas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Selisih (Bertambah/ Berkurang)	Catatan Penting	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	Renja Murni 2025	Renja Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasi onal	Daer ah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.09.03.2.02.00 03	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	48	16	20	14	25,3	209.822.500	270.977.980	447.557.980	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			176.580.000	CPPD Kota Cimahi sudah tersedia di Murni 13,3 ton + 12 Ton (Penyesuaian dengan Target Jumlah CPPD untuk Kota Cimahi dari Bapanas sebesar 64,43 Ton (perubahan) tambahan anggaran pembelian CPPD 180.000.000 dari pengalihan efisiensi
	2.09.03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPh Konsumsi(Skor)	84,2	90,4	90,14	84	90,14	472.464.018	470.440.500	482.328.500					11.888.000	Penyesuaian Hasil Rakor Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat
	2.09.03.2.04.00 01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dok)	4	1	2	2	2	177.000.000	177.054.000	177.054.000	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Pengharga an Kinerja Tahun Sebelumn ya			0	
	2.09.03.2.04.00 02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber	6	8	4	4	4	295.464.018	293.386.500,	305.274.500	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			11.888.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Selisih (Bertambah/ Berkurang)	Catatan Penting	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	Renja Murni 2025	Renja Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasi onal	Daer ah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Berbasis Sumber Daya Lokal	Daya Lokal (Laporan)														
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100	100	100	100	100	2.687.592.050	1.936.763.700	1.902.299.50					-34.464.200	
	2.09.04.2.01	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan wilayah penanganan kerawanan pangan (Kecamatan)	3	3	3	3	3	24.019.900	20.177.300	19.157.300					-1.020.000	
	2.09.04.2.01.001	Sub Kegiatan Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan (Dok)	4	1	1	1	1	24.019.900	20.177.300	19.157.300	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			-1.020.000	
	2.09.04.2.02	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah penanganan kasus kerawanan pangan (KK)	2000	1623	1760	100 persen	100 persen	2.663.572.100	1.906.619.000	1.883.142.200					-33.444.200	
	2.09.04.2.02.002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	3	3	3	2.653.572.100	1.906.619.000	1.868.870.800	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya			-37.748.200	
	2.09.04.2.02.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12	12	2	12	12	10.000.050	9.967.400	14.271.400,	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			4.304.000	
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	80	98	98	70	95	78.743.800	128.011.100	226.051.100					98.040.000	
	2.09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan	Jumlah pengawasan ke	24	24	12	12	12	78.743.800	128.011.100	226.051.100					98.040.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Selisih (Bertambah/ Berkurang)	Catatan Penting
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	Renja Murni 2025	Renja Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasi onal	Daer ah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	retail atau pasar (kali)														
	2.09.05.2.01.00 04	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4	1	1	1	1	28.743.800	28.743.600	28.743.600	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			0	
	2.09.05.2.01.00 07	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	12	12	12	50.000.000	99.267.500	197.307.500	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			98.040.000	Penambahan Rp. 97 juta untuk pembelian alat uji pestisida modern
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.051.312.080	3.752.001.000	3.968.792.150					216.791.150	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							951.008.22	905.394.100	991.844.100					86.450.000	
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi ikan Konsumsi (Ton)	290	289,3	290	300	291	820.704.920	690.090.900	776.540.900					86.450.000	Penyesuaian dengan hasil monev dan validasi
			Produksi Ikan Hias (ekor)	2.375.0 00	2.464.92 0	2.479.098	2.380.00 0	2.480.00 0									
	3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang diberdayakan (Kelompok)				1	16	245.000.000	245.000.000	245.000.000					0	Penyesuaian dengan kelompok yang dibimbing yang terdiri dari kelompok ikan konsumsi dan ikan hias
	3.25.04.2.02.00 04	Sub Kegiatan Pemberian pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan	Jumlah Kelompok Usaha yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan	18	15	4	4	4	245.000.000	245.000.000	245.000.000	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk			0	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Selisih (Bertambah/ Berkurang)	Catatan Penting	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	Renja Murni 2025	Renja Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasi onal	Daer ah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pendidikan dan Pelatihan	Teknologi dan Informasi serta penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan										Pengharga an Kinerja Tahun Sebelumn ya				
	3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih ikan konsumsi yang dihasilkan (ekor)	97.725	110.478	143.750	108000	108000	575.704.920	445.090.900	531.540.900					86.450.000	
			Jumlah benih ikan hias yang dihasilkan (ekor)	7.500	9.060	7.780	8250	8250									
			Jumlah penerimaan retribusi (rupiah)	47.000. 000	45.516.2 50	60.472.50 0	50.000.0 00	54.000.0 00									Penyesuaian dengan jumlah target PAD tahun 2025
	3.25.04.2.04.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	4.999.750	4.999.750	4.999.750	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			0	
	3.25.04.2.04.00 03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	4	1	1	1	1	570.705.170	440.091.150	526.541.150	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa					
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil perikanan	1	1	2	3	2	130.303.300	215.303.200	215.303.200					0	Penyesuaian dengan hasil monev dan validasi data UPI ada pengurangan
	3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha Pengolahan dan Pemasar Produk Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil (UPI)	10	10	17	10	10	130.303.300	215.303.200	215.303.200					0	
	3.25.06.2.02.00 02	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan	Jumlah unit usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil	5	1	25	1	10	130.303.300	215.303.200	215.303.200	Kota Cimahi, Semua	Dana Bagi Hasil (DBH)			0	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Selisih (Bertambah/ Berkurang)	Catatan Penting	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	Renja Murni 2025	Renja Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasi onal	Daer ah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko									Kecamata n, Semua Kel/Desa					
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							3.100.303.860	2.846.606.900	2.976.948.05					130.341.150	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang disediakan dan dikembangkan (%)	30	30	30	30	30	50.000.000	49.999.750,	16.399.750					-33.600.000	
	3.27.03.2.01	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kawasan	1	1	1	1	1	50.000.000	49.999.750,	16.399.750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				-33.600.000	
	3.27.03.2.01.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (dok)	4	1	1	1	1	50.000.000	49.999.750,	16.399.750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			-33.600.000	
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	Persentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Jumlah	100	100	100	100	100	1.216.070.978	1.173.548.400	1.390.248.400					216.700.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Selisih (Bertambah/ Berkurang)	Catatan Penting	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	Renja Murni 2025	Renja Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasi onal	Daer ah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		MASYARAKAT VETERINER	Kelurahan yang dilayani)														
	3.27.04.2.01	Kegiatan Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang divaksinasi menular dalam Daerah kabupaten/Kota (kelurahan) Rabies	2000	1300	1894	4240	3350	301.557.444,	300.124.200	345.444.200					45.320.000	Hasil koordinasi dengan pusat untuk vaksinasi Rabies ke ruminansia belum di prioritaskan
			Flu Burung	1500	600	968	600	600									
	3.27.04.2.01.00 08	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	4	4	4	4	301.557.444,	300.124.200	345.444.200	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			45.320.000	Penambahan kekurangan bimtek kader kesmavet, dari TAPD 20 Juta, dan ditambah dari pergeseran subkegiatan pertanian penambahan menjadi 45.000.000,00
	3.27.04.2.02	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah hewan qurban yang diperiksa (ekor)	12000	3613	3870	3000	3000	51.809.000	53.212.000	53.212.000						
			Jumlah Pengujian pangan asal hewan (sample)	200	10	21	50	28									Penyesuaian target dengan jumlah dengan hasil monev TW I
	3.27.04.2.02.00 06	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	4	4	4	4	4	51.809.000	53.212.000	53.212.000	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			0	
	3.27.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	7000	8007	8937	7500	7500	862.704.534	820.212.200	991.592.200					171.380.000	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Selisih (Bertambah/ Berkurang)	Catatan Penting	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	Renja Murni 2025	Renja Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasi onal	Daer ah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah penerimaan Retribusi kabupaten/Kota	303.87 5.000	325.970. 000	361.860.0 00	303.215. 000	303.215. 000									
	3.27.04.2.03.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah laporan pelayanan Jasa Medik Veteriner	48	12	12	12	12	862.704.534	820.212.200	991.592.200	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)			171.380.000	
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	100	100	100	100	100	9.381.700	9.411.700	9.411.700					0	
	3.27.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi perizinan (Rekomendasi)	20	9	7	5	5	9.381.700	9.411.700	9.411.700	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa				0	
	3.27.06.2.01.00 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (dok)	20	9	7	5	5	9.381.700	9.411.700	9.411.700	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)				
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	10	11,76	15	6	11,76	1.824.851.182	1.613.647.05	1.560.888.200					-52.758.850	
	3.27.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik skor kelompok (kelompok)	17	41	11	6	6	1.824.851.182	1.613.647.05	1.560.888.200					-52.759.850	
	3.27.07.2.01.00 02	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	33	33	33	33	40	102.000.000	101999750	110.339.750	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			8.340.000	Terdapat penambahan anggaran dari pergeseran subgiat LP2B dan Sekolah berkebun

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Selisih (Bertambah/ Berkurang)	Catatan Penting	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	Renja Murni 2025	Renja Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasi onal	Daer ah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3.27.07.2.01.00 03	Sub Kegiatan Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5	5	6	5	8	1.722.851.182	1.511.647.300	1.450.548.450	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik- Dana Ketahana n Pangan dan Pertanian- Pertanian			-61.098.850	Target bertambah semula 5 menjadi 8, yaitu sebagai berikut: 1. Bibit Tanaman 2. Bibit Lebah Trigona 3. Obat obatan 4. Festival Agribisnis 5. Alsintan 6. IoT 7. Pengadaan Bibit Padi 8. expo peternakan

BAB V
PENUTUP

1.1 CATATAN PENTING

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai bulan Maret 2025 (Cut Off 30 Maret 2025) Triwulan I (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.

Untuk realisasi anggaran kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 dalam melaksanakan 10 program, 25 kegiatan dan 39 sub kegiatan, sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d. Triwulan I	Realisasi Fisik s.d. Triwulan I
Rp. 18.032.351.854	15,65%	19,33%

Sementara itu untuk anggaran pada Renja Perubahan Dinas Pangan dan Pertanian Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 mengalami kenaikan anggaran, yang semula Rp.17.771.448.854,00 menjadi Rp.18.252.491.854,00. Selisih total anggaran sebelum dan sesudah perubahan sebesar Rp. 481.043.000,00 (2,64%).

Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2025, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi pada Tahun 2025 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kota Cimahi dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

1.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Cimahi Nomor 9 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Kota Cimahi Tahun 2025. Atas dasar kebijakan tersebut, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cimahi tahun 2025 dan bersifat indikatif.

1.3 RENCANA TINDAK LANJUT

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan
2. Koordinasi dengan Bappelitbangda Kota Cimahi terkait penyusunan Renstra 2025-2029 yang akan datang.
3. Koordinasi dengan TAPD terkait kegiatan yang berkaitan dengan Surat Keputusan Bapanas dan Menteri Pertanian